



LEMBARAN KALURAHAN NGORO-ORO
KAPANEWON PATUK KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NOMOR : 2

TAHUN : 2025

PERATURAN KALURAHAN NGORO-ORO
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA NGORO-ORO NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
TAHUN 2018 - 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH NGORO-ORO,

- Menimbang :
- a. bahwa Kalurahan Ngoro-oro telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2024 dengan Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2019;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dapat diubah dalam hal terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Ngoro-oro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7060);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 116);
10. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
11. Peraturan Desa Ngoro-oro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2024 (Lembaran Desa Ngoro-oro Tahun 2019 Nomor 2);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN NGORO-ORO
dan
LURAH NGORO-ORO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA NGORO-ORO NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA TAHUN 2018-2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Desa Ngoro-oro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2024 (Lembaran Desa Ngoro-oro Tahun 2019 Nomor 2) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Judul diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KALURAHAN TAHUN 2019-2026
2. Ketentuan konsideran menimbang diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - a. bahwa untuk memberikan kejelasan arah pembangunan yang ingin dicapai diperlukan suatu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan yang disusun berdasarkan visi, misi, dan program kerja Lurah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan dalam skala Kalurahan tersebut, pelaksanaannya sesuai dengan daftar skala prioritas berdasarkan pada kewenangan Kalurahan, perlu dibuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM Kalurahan);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2019-2026;
3. Ketentuan menetapkan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
PERATURAN KALURAHAN TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KALURAHAN TAHUN 2019-2026.
4. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan:

1. Kalurahan adalah sebutan Desa di wilayah Kabupaten Gunungkidul yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat Kalurahan dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kalurahan.
4. Lurah adalah sebutan kepala Desa merupakan pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kalurahannya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
5. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut Bamuskal adalah sebutan lain Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Gunungkidul.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut APB Kalurahan adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kalurahan yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Kalurahan dan Bamuskal yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.
7. Keuangan Kalurahan adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Kalurahan tersebut.
8. Lembaga Kalurahan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Kalurahan dalam memberdayakan masyarakat.
9. Musyawarah Kalurahan yang selanjutnya disebut Muskal adalah musyawarah antara Bamuskal, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Bamuskal untuk menyepakati hal-hal yang bersifat strategis, termasuk perencanaan Kalurahan (RPJM Kalurahan dan RKP Kalurahan).

10. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan yang selanjutnya disebut Musrenbangkal adalah forum musyawarah tahunan di tingkat Kalurahan yang melibatkan Pemerintah Kalurahan, Bamuskal, dan seluruh unsur masyarakat untuk membahas dan menyepakati Rencana Kerja Pembangunan Kalurahan (RKP Kalurahan) serta prioritas pembangunan Kalurahan lainnya yang didanai dari APB Kalurahan.
 11. Visi adalah suatu gambaran tantangan masa depan yang berisikan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh Lurah pada saat pencalonan berdasarkan keadaan objektif Kalurahan.
 12. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Lurah agar visi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik atau merupakan penjabaran dari visi sehingga dapat terwujud secara efektif dan efisien.
 13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan yang selanjutnya disebut RPJM Kalurahan adalah rencana pembangunan kalurahan untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun.
 14. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan yang selanjutnya disebut RKP Kalurahan adalah penjabaran dari RPJM Kalurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
 15. Peraturan Kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Pemerintah Kalurahan Bersama Bamuskal.
5. Ketentuan BAB II diubah sehingga BAB II berbunyi sebagai berikut:

BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KALURAHAN

6. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2019 – 2026 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

7. Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Desa Ngoro-oro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2024 (Lembaran Desa Ngoro-oro Tahun 2019 Nomor 2) diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

8. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindari kekosongan rencana pembangunan Kalurahan, Lurah yang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya wajib menyusun RKP Kalurahan untuk tahun pertama periode pemerintahan berikutnya.
- (2) RKP Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan APB Kalurahan tahun pertama periode pemerintahan berikutnya.
- (3) Pada saat Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku, target dan realisasi yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Desa Ngoro-oro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2024 (Lembaran Desa Ngoro-oro Tahun 2019 Nomor 2) dinyatakan masih tetap berlaku dan selanjutnya harus menyesuaikan berdasarkan Peraturan Kalurahan ini.

Pasal II

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Ngoro-oro.

Ditetapkan di Ngoro-oro
pada tanggal 29 September 2025
LURAH NGORO-ORO,

ttd

SUKASTO

Diundangkan di Ngoro-oro
pada tanggal 29 September 2025

CARIK NGORO-ORO,

ttd

DALYUNI

LEMBARAN KALURAHAN NGORO-ORO TAHUN 2025 NOMOR 2

LAMPIRAN
PERATURAN KALURAHAN NGORO-ORO
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA
NGORO-ORO NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DESA TAHUN
2018 - 2024

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

RPJM Kalurahan sebagai dokumen perencanaan jangka menengah harus disesuaikan dengan dinamika yang terjadi. Seiring dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta adanya perubahan prioritas pembangunan nasional dan daerah Mendasarkan pada PP Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJM Nasional Tahun 2025-2029 dan draft akhir RPJM Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029, maka diperlukan penyesuaian terhadap RPJM Kalurahan Ngoro-oro dikarenakan perubahan masa jabatan Lurah dan perubahan realita dilapangan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan berfungsi sebagai data perencanaan periode 8 (enam) tahun periode jabatan Lurah.

Partisipasi masyarakat dalam setiap proses perencanaan pembangunan perlu adanya sinkronisasi antara pembangunan di kalurahan dengan arah kebijakan pembangunan daerah dan nasional.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan kalurahan perlu disusun perencanaan pembangunan kalurahan sebagai satu kesatuan yang menjadi arah dalam sistem perencanaan pembangunan daerah Kabupaten. Perencanaan pembangunan kalurahan yang dimaksud adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM-Kalurahan) untuk jangka 8 (delapan) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP-Kalurahan) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sangat diperlukan sebagai pedoman dalam rangka melaksanakan pembangunan. RKP-Kalurahan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM-Kalurahan) dengan memuat indikasi program dan kegiatan yang bersumber dari APBKalurahan, APBD Kabupaten, APBD Propinsi, APBN, atau swadaya serta pembiayaan lainnya seperti hibah dan program lain.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 – 2045;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026;
11. [Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029;](#)
12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
13. Peraturan Desa Ngoro-oro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2024;
14. Peraturan Desa Ngoro-oro Nomor 3 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Desa Ngoro-oro;
15. Peraturan Kalurahan Ngoro-oro Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pungutan Kalurahan.

C. Pengertian

RPJM Kalurahan adalah rencana pembangunan jangka menengah untuk jangka waktu 6 tahun, yang memuat arah kebijakan, strategi, program, dan kegiatan pembangunan kalurahan. Perubahan RPJM Kalurahan adalah penyesuaian terhadap RPJM Kalurahan yang telah ditetapkan, guna mengakomodasi dinamika baru yang terjadi dalam pemerintahan dan masyarakat kalurahan yaitu penambahan masa jabatan Lurah yang awalnya 6 (enam) tahun menjadi 8 (delapan) tahun dampak dari diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 serta ketidak sesuaian program lama dengan realitas lapangan.

D. Maksud dan Tujuan

Maksud:

Maksud dari penyusunan dokumen ini adalah untuk memperbarui arah pembangunan Kalurahan Ngoro-oro dalam jangka menengah dan menyesuaikan arah kebijakan pembangunan kalurahan.

Tujuan:

1. Menyusun dokumen perencanaan sesuai dengan masa jabatan 8 tahun.
2. Menyusun kembali program prioritas yang lebih sesuai dengan visi-misi Presiden terpilih. dan Bupati terpilih.
3. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kalurahan dengan Kebijakan Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat.

BAB II
PROFIL KALURAHAN

A. Kondisi Kalurahan

Kalurahan Ngoro-oro adalah merupakan salah satu kalurahan dari 144 kalurahan yang ada di Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta berada di wilayah Kapanewon Patuk Kabupaten Gunungkidul, dengan jarak pusat pemerintahan dengan ibu kota Kapanewon ± 7 km, jarak dengan ibu kota Kabupaten ± 27 km, jarak dengan ibu kota Provinsi ± 37 km, jarak dengan ibu kota Pemerintah Pusat ± 780 km, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kalurahan Gayamharjo/ Wukirharjo
Kapanewon Prambanan Kabupaten Sleman
- Sebelah Timur : Kalurahan Terbah Kapanewon Patuk
- Sebelah Selatan : Kalurahan Nglanggeran Kapanewon Patuk
- Sebelah Barat : Kalurahan Patuk Kapanewon Patuk

Kondisi topografis Kalurahan Ngoro-oro secara ringkas adalah sebagai berikut:

- Ketinggian tanah 700 m di atas permukaan laut.
- Kondisi tanah adalah lereng berbukit-bukit dengan jenis tanah
- Banyaknya curah hujan per tahun 7,762 mm/tahun dengan jumlah rata-rata 80 hari; bulan basah berkisar antara 4-5 bulan, sedangkan bulan kering berkisar antara 7-8 bulan; musim hujan dimulai sekitar bulan Oktober – Nopember dan berakhir pada bulan Maret-April setiap tahunnya; puncak curah hujan dicapai pada bulan Desember-Pebruari. Suhu udara berkisar antara 24^oC sampai dengan 34^oC.
- Jumlah sungai di Kalurahan Ngoro-oro ada 2 (dua) buah yang berada di Padukuhan Senggotan dan Padukuhan Klegung. Sumber air di Kalurahan berasal dari sumur air dalam dan beberapa sumber mata air di Padukuhan Senggotan, Sepat, Tawang dan Klegung.

Luas wilayah Kalurahan Ngoro-oro : 753,7909 Ha.

Dari wilayah yang dimiliki sebagian besar berupa lahan pertanian, adapun lahan pertanian yang dimiliki Kalurahan Ngoro-oro sebagian besar berupa lahan kering tadah hujan (95 %) yang tergantung pada iklim khususnya curah hujan. Lahan sawah beririgasi relatif kecil dan sebagian besar sawah tadah hujan. Adapun rincian lahan pertanian Kalurahan Ngoro-oro adalah sebagai berikut.

No	Uraian	Luas (ha)
1	Sawah tadah hujan	253,4270
2	Ladang tegalan	329,7742
3	Pekarangan	139,0800
4	Hutan milik warga masyarakat	15,2343
5	Perikanan	0,0750
6	Tanah kritis/tandus	10,2500

Kependudukan.

1. Jumlah Penduduk

- a. Laki-laki : 1.783 jiwa
- b. Perempuan : 1.880 jiwa

c. Jumlah Jiwa	: 3.663	jiwa
d. Jumlah Kepala Keluarga	: 1.159	KK
e. Klompok Usia :		
• Usia 0 – 15	: 777	orang
• Usia 15 – 65	: 2.477	orang
• Usia 65 ke-atas	: 409	orang
2. Pekerjaan / Mata Pencanharian		
a. Pegawai Negeri Sipil	: 25	orang
b. TNI/Polri	: 7	orang
c. Karyawan Swasta	: 217	orang
d. Wiraswasta/Pedagang	: 701	orang
e. Petani	: 1.133	orang
f. Buruh Harian Lepas	: 110	orang
g. Buruh Tani	: 63	orang
h. Pensiunan	: 17	orang
i. Nelayan	: -	
j. Mengurus Rumah Tangga	: 180	orang
k. Guru	: 18	orang
l. Pamong Kalurahan	: 22	orang
m. Pelajar	: 485	orang
n. Sopir	: 18	orang
o. Belum/Tidak Bekerja	: 682	orang
3. Tingkat Pendidikan Masyarakat	:	
a. Lulusan pendidikan umum	:	
1) Taman Kanak-kanak	: 98	orang
2) Sekolah Dasar / Sederajat	: 845	orang
3) SMP	: 767	orang
4) SMA / SMU	: 557	orang
5) Akademi / D1-D3	: 41	orang
6) Sarjana	: 131	orang
7) Pascasarjana	: 2	orang
b. Lulusan Pendidikan Khusus	:	
1) Pondok Pesantren	:	
2) Pendidikan Keagamaan	:	
3) Sekolah Luar Biasa	: 3	orang
4) Kursus Ketrampilan	: 218	orang
c. Tidak lulus dan tidak sekolah	:	
1) Tidak Lulus	: 223	orang
2) Tidak Bersekolah	: 793	orang
4. Jumlah Penduduk Miskin tahun 2025 (menurut standar BPS)	: 165	orang

Perekonomian Desa

Potensi sumber ekonomi yang dimiliki Kalurahan Ngoro-oro cukup beragam, mulai dari tanah persawahan hingga perbukitan dengan segala kekayaan alamnya. Keadaan potensi sumber daya alam Kalurahan Ngoro-oro adalah sebagai berikut :

1. Lahan Pertanian

Lahan sawah yang dapat ditanami padi 2 (dua) kali dalam satu tahun adalah seluas kurang lebih 4 ha. Lahan tegal umumnya diusahakan untuk kegiatan usaha tani padi-pala wija dengan pola tumpang sari.

2. Hutan

Hutan rakyat di Kalurahan Ngoro-oro seluas kurang lebih 15,2343 ha yang berfungsi sebagai hutan produktif.

3. Flora dan fauna

Flora dan fauna yang ada di Wilayah Kalurahan Ngoro-oro cukup beragam dan memiliki kekhasan ekosistem yang didominasi lahan kering dan perbukitan.

Flora yang dapat dijumpai di Wilayah Kalurahan Ngoro-oro dapat dikelompokkan dalam dua kelompok besar, yaitu tanaman musiman dan tanaman tahunan.

Tanaman musiman antara lain meliputi padi (sawah dan gogo), palawija (jagung, kacang tanah, kedelai, ubi kayu dan bermacam-macam polo pendem), serta sayur-sayuran (bayam, cabai, tomat dsb). Tanaman tahunan antara lain meliputi tanaman buah-buahan (mlinjo, pisang, durian, rambutan, mangga, kelapa dan kakao) serta kayu-kayuan (jati, sono keling, mahoni, sengon laut, sengon jowo dan bambu).

Fauna darat dan udara yang ada di Wilayah Kalurahan Ngoro-oro pada saat ini antara lain burung emprit, kutilang, perkutut, ayam hutan, ular dsb). Fauna air yang ada adalah lele, mujair, wader, gabus dsb. Selain itu terdapat jenis populasi ternak yaitu sapi, kambing, ayam kampung, bebek, mentok, dan angsa.

4. Industri Kecil dan Menengah

Industri kecil dan menengah yang ada di Wilayah Kalurahan Ngoro-oro kurang lebih 153 pelaku usaha mikro kecil dan menengah terdiri dari kelompok dan individu. Adapun jenis usahanya terdiri dari makanan olahan, pengolahan kayu, bambu, kerajinan kulit dan konfeksi. Industri mikro kecil dan menengah ini berbasis pada hasil pertanian dan hasil hutan.

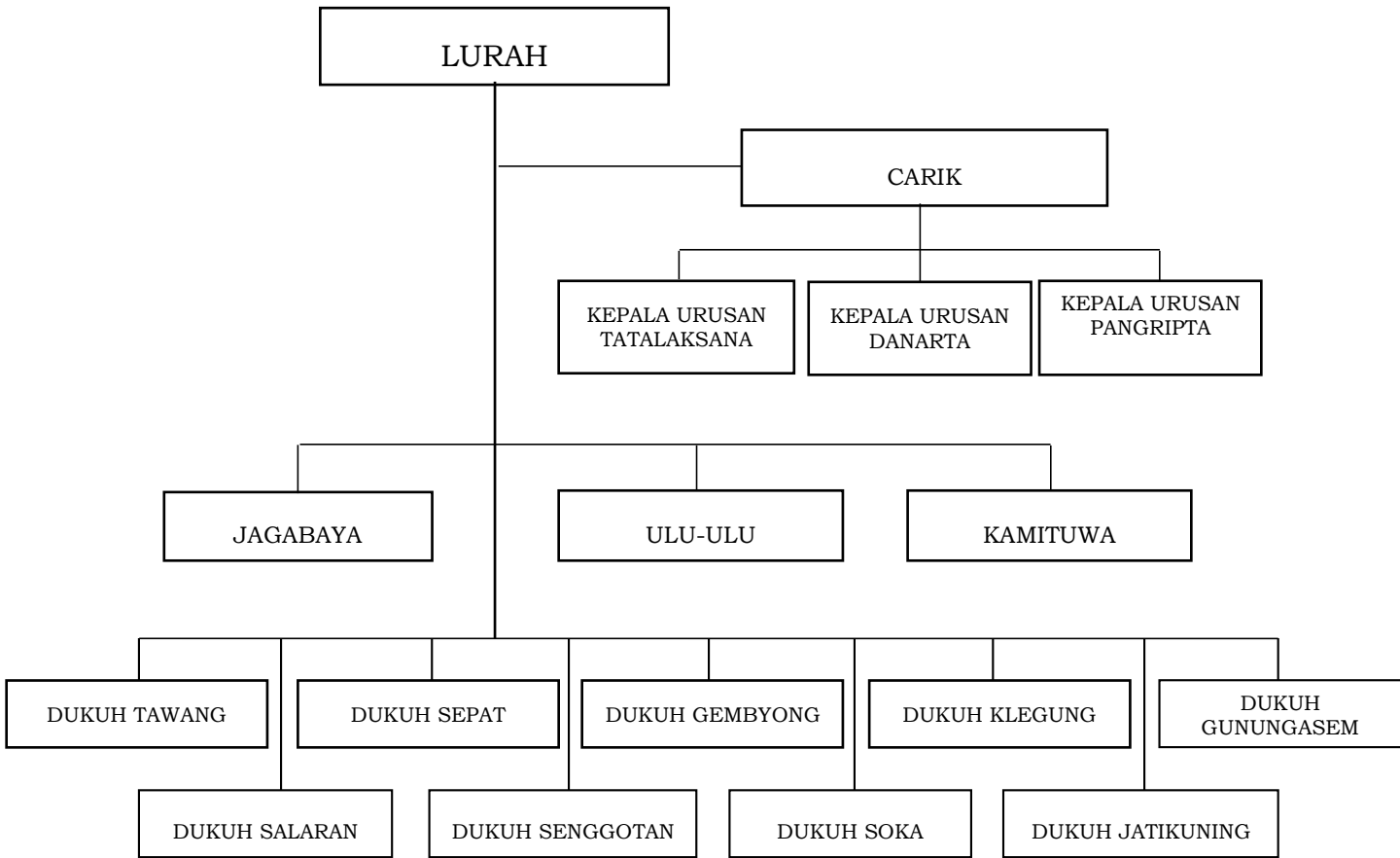
B. Kondisi Pemerintahan Kalurahan

1. Struktur Organisasi Pemerintahan Kalurahan.

Pemerintah Kalurahan Ngoro-oro dalam menjalankan tugas dan fungsinya berupaya selalu berpedoman pada regulasi yang berlaku. Keberhasilan pelaksanaan dibidang pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat tidak lepas dengan keberadaan lembaga kalurahan dan dukungan SDM Aparatur Pemerintah Kalurahan yang ada. Adapun SDM Aparatur Pemerintah Kalurahan yang ada terdiri dari :

- Lurah : 1 orang;
- Carik : 1 orang;
- Kepala Urusan : 3 orang;
- Jagabaya : 1 orang;
- Ulu-Ulu : 1 orang;
- Kamituwa : 1 orang;
- Dukuh : 7 orang;
- Staf Pamong Kalurahan : 4 orang.

Bagan Struktur Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Ngoro-oro, mengacu Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2019 jo Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor Nomor 20 Tahun 2020, digambarkan sebagai berikut :



2. Data Pamong Kalurahan

Adapun data Lurah dan Pamong Kalurahan pada tahun 2025 selengkapnya sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Pendidikan
1	SUKASTO	Lurah	SLTA
2	DALYUNI	Carik	SLTA
3	JUMANI	Jagabaya	Diploma
4	SURYA WIJAYA	Ulu-ulu	S1
5	ENDANG WURIYANTI	Kamituwa	S1
6	ANGGUN MERIDIANA	Kaur. Tata Laksana	S1
7	SUNARTO	Kaur. Danarta	SLTA
8	PANUT	Kaur. Pangripta	SLTA
9	SUPRIHATIN	Dukuh Tawang	SLTA
10	RUKMINI	Dukuh Sepat	SLTP
11	RISTANTO	Dukuh Gembyong	SLTA
12	MARYOTO	Dukuh Klegung	SLTA
13	IKA WIHAYANTO	Dukuh Gunungasem	SLTA
14	WIWIN ENDARWATI	Dukuh Senggotan	SLTA
15	KASWADI	Dukuh Soka	SLTA
16	GIYANTO	Staf Kasi. Ulu-ulu	SLTA
17	ITA NURNAMASARI	Staf Kasi. Jagabaya	SLTA
18	FERIYANTI	Staf Kaur. Kamituwa	SLTA
19	RAHMI SUKEPTI	Staf Kaur. Danarta	SLTA

3. Data Lembaga Kalurahan

1) Badan Permusyawaratan Kalurahan

Unsur Badan Permusyawaratan Kalurahan (BAMUSKAL) terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, 2 (dua) Kepala Bidang (Kabid) dan 4 (empat) Anggota. Susunan Bamuskal Ngoro-oro adalah sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Unsur Perwakilan
1	SUMARDI	Ketua	Wilayah VI
2	JUMIRAH	Wakil Ketua	Wilayah VIII
3	JUWATI, S.Pd. M.Pd.	Sekretaris	Perwakilan Perempuan
4	SUBANDI	Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Pembinaan Kemasyarakatan	Wilayah II
5	RUSIYEM, A.Md	Ketua Bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Wilayah III
6	WAGIYO	Anggota	Wilayah IV
7	ARIS ISTIAWAN	Anggota	Wilayah I
8	SURADI	Anggota	Wilayah V
9	SUMARDI	Anggota	Wilayah VII

2) Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan

Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan terdapat 7 (tujuh) lembaga yang ada di kalurahan, 6 (enam) lembaga dengan masa jabatan pengurusnya selama 5 (lima) tahun yaitu : RT, RW, PKK, Posyandu, LPMP dan LPMK, serta 1 (satu) lembaga masa jabatan pengurusnya 3 (tiga) tahun yaitu Karang Taruna.

a. Rukun Tetangga RT dan Rukun Warga (RW)

RT dan RW merupakan salah satu lembaga yang fungsinya sebagai mitra Pemerintah Kalurahan dalam bidang pemerintahan dan pembinaan kerukunan, ketertiban dan keamanan masyarakat di lingkungan wilayahnya serta penggerak swadaya dan gotong royong masyarakat. Adapun data Ketua RT dan RW sebagai berikut :

No	Padukuhan	RT		RW	
		Nama	Ketua	Nama	Ketua
1	Tawang	NGADIRAN	001	SUHARDI S	001
		SUNARYO	002		
		TAHYONO	003		
		SUHARJONO	004		
2	Sepat	PARLAN	005	SUGIYANTO	002
		NGATIMIN	006		
		HAMID	007		
		JAYADI	008		

3	Gembyong	NGADIYO SATI NUR UTAMI SAKIMIN HARTO WIYONO	009 010 011 012	SUGIYO	003
4	Klegung	SUGENG GUNADI SUPRIYANTO SUSANTO	013 014 015 016	MARGONO	004
6	Gunungasem	SUMARWANTO SUHARDI HADI PURWANTO SULIS SARYANTO	017 018 019 020	SUBANI	005
6	Salaran	GIYANTA SUROTO HARYANTO SUPOMO	021 022 023 024	YATIMIN	006
7	Senggotan	TUKIMN AGUS SETIAWAN WARJU SUHARNO	025 026 027 028	HERI BAWA S.	007
8	Soka	SUTRIYONO SLAMET RAHARJO WASIMAN	029 030 031	SANIYO	008
		SUTRISNO EDI SUMARWAN MARNO	032 033 034	SLAMET	009
9	Jatikuning	SUWASNO SALIYO SAMADI	035 036 037	HARYONO	010
		PURWADI SANTOSO PANIYO	038 039 040	ISSANA	011

b. PKK (Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga)

Peran dan fungsi PKK dalam upaya memberdayakan masyarakat khususnya kaum perempuan di pedesaan sangat penting. Sehingga kaum perempuan memiliki kedudukan dan peran yang setara dengan kaum laki-laki.

Kegiatan PKK Kalurahan Ngoro-oro selama ini antara lain:

- Pertemuan atau rapat rutin setiap bulan yang dilaksanakan di Balai Kalurahan setiap tanggal 3 (tiga), bulan bersangkutan.
- Peningkatan pengetahuan dengan mengikuti pelatihan, seminar dan sosialisasi program seperti :
 - Kursus kesetaraan gender.
 - Seminar penanggulangan KDRT.
 - UU Perlindungan anak.
 - Kursus ketrampilan

Adapun Kepengurusan PKK Kalurahan Ngoro-oro adalah sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Alamat
1	SUMARNI	Ketua	Soka
2	SUGIYEM	Wakil Ketua	Sepat
3	WIJI SUHARTI	Sekretaris I	Soka
4	BEKTININGSIH	Sekretaris II	Salaran
5	WAGIYEM	Bendahara I	Soka
6	SUPRAPTI	Bendahara II	Gunungasem
7	SRI LESTARI	Koordinator Pokja I	Salaran
8	SUWARNI	Anggota	Gunungasem
9	YANTIYEM	Anggota	Soka
10	ROKHANA	Anggota	Tawang
11	SUMARMI	Koordinator Pokja II	Sepat
12	SUKARMI	Anggota	Klegung
13	YUNI SUMARSIH	Anggota	Gembyong
14	MURSIDAH	Anggota	Klegung
15	SUMIYATI	Koordinator Pokja III	Senggotan
16	PUJI LESTARI	Anggota	Soka
17	SUTARTI	Anggota	Klegung
18	TRI HASTUTI	Anggota	Sepat
19	SITI KURNIASIH	Koordinator Pokja IV	Salaran
20	WIDAYATI	Anggota	Jatikuning
21	TRININGSIH	Anggota	Tawang
22	IKA PUSPITARINI	Anggota	Jatikuning

c. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu).

Posyandu terdapat di semua Padukuhan di Kalurahan Ngoro-oro, di setiap Posyandu terdapat kader Posyandu yang terdiri dari kader Posyandu Balita dan kader Posyandu lansia.

Kegiatan kader posyandu sudah dilaksanakan dengan kegiatan posyandu nyawiji yang didampingi oleh puskesmas, kegiatannya berupa :

- Pendaftaran;
- Penimbangan/pengukuran;
- Pencatatan;
- Pemeriksaan kesehatan (pelayanan kesehatan; dan
- Penyuluhan kesehatan.

Kegiatan posyandu dimasing-masing padukuhan dilaksanakan 1 (satu) kali dalam setiap bulan secara rutin antara tanggal 10, 11 dan 12 pada bulan bersangkutan, tergantung padukuhan masing-masing.

Adapun Anggota Kader Posyandu Balita, yaitu :

NO	N A M A	JABATAN	ALAMAT
1	Rinawati	Kader Yandu Kelapa	Tawang
2	Sri Rahayu	Kader Yandu Kelapa	Tawang
3	Rahmi Pratiwi	Kader Yandu Kelapa	Tawang
4	Baryati	Kader Yandu Kelapa	Tawang
5	Yaimah	Kader Yandu Kelapa	Tawang
6	Sumarmi	Kader Yandu Sono	Sepat
7	Alviana	Kader Yandu Sono	Sepat

8	Parmiyati	Kader Yandu Sono	Sepat
9	Tumiyem	Kader Yandu Sono	Sepat
10	Yuni Isnaini	Kader Yandu Sono	Sepat
11	Sunarti	Kader Yandu Beringin	Gembyong
12	Sati Nur Utami	Kader Yandu Beringin	Gembyong
13	Muryadi	Kader Yandu Beringin	Gembyong
14	Sri Mursilah	Kader Yandu Beringin	Gembyong
15	Risna Erviana	Kader Yandu Beringin	Gembyong
16	Sutarti	Kader Yandu Sengon	Klegung
17	Arwanti	Kader Yandu Sengon	Klegung
18	Suripti	Kader Yandu Sengon	Klegung
19	Sugiyanti	Kader Yandu Sengon	Klegung
20	Tri Nuryani	Kader Yandu Sengon	Klegung
21	Titik Yuliani	Kader Yandu Bibisan	Gunungasem
22	Rupmini	Kader Yandu Bibisan	Gunungasem
23	Ernawati	Kader Yandu Bibisan	Gunungasem
24	Eni Tri Lestari	Kader Yandu Bibisan	Gunungasem
25	Dewi Apriliyani	Kader Yandu Bibisan	Gunungasem
26	Siti Rahayu	Kader Yandu Mahoni	Salaran
27	Rita Kurniawati	Kader Yandu Mahoni	Salaran
28	Nurul Karimah	Kader Yandu Mahoni	Salaran
29	Anggita Setyo P	Kader Yandu Mahoni	Salaran
30	Titin Sutrisnawati	Kader Yandu Mahoni	Salaran
31	Salamah	Kader Yandu Purmis	Senggotan
32	Sri Rahayu	Kader Yandu Purmis	Senggotan
33	Misrini	Kader Yandu Purmis	Senggotan
34	Nunik Aryani	Kader Yandu Purmis	Senggotan
35	Suliyanti	Kader Yandu Purmis	Senggotan
36	Yantiyem	Kader Yandu Kakao	Soka
37	Wagiyem	Kader Yandu Kakao	Soka
38	Ria Maryanti	Kader Yandu Kakao	Soka
39	Ika Desi	Kader Yandu Kakao	Soka
40	Parmiasih	Kader Yandu Kakao	Soka
41	Ika Puspitarini	Kader Yandu Asem	Jatikuning
42	Widayati	Kader Yandu Asem	Jatikuning
43	Uswatun Khasanah	Kader Yandu Asem	Jatikuning
44	Yuli Ernawati	Kader Yandu Asem	Jatikuning
45	Deni Ratnasari	Kader Yandu Asem	Jatikuning
46	Wiji Suharti	Koordinator Kader	Soka

Adapun Anggota Kader Posyandu Lansia, yaitu :

NO	N A M A	JABATAN	ALAMAT
1	Rusmawati	Kader Yandu Lansia	Tawang
2	Setyaningsih	Kader Yandu Lansia	Tawang
3	Nurhayati	Kader Yandu Lansia	Tawang
4	Dwi Retnaningsih	Kader Yandu Lansia	Tawang
5	Nihar Astuti	Kader Yandu Lansia	Sepat
6	Rubini	Kader Yandu Lansia	Sepat

7	Tuginah	Kader Yandu Lansia	Sepat
8	Umi Nurjani	Kader Yandu Lansia	Sepat
9	Widatik	Kader Yandu Lansia	Gembyong
10	Suryanti	Kader Yandu Lansia	Gembyong
11	Qoyimah	Kader Yandu Lansia	Gembyong
12	Siska Lestari	Kader Yandu Lansia	Gembyong
13	Dwi Purwanti	Kader Yandu Lansia	Klegung
14	Wahyu Lestari	Kader Yandu Lansia	Klegung
15	Dalmi	Kader Yandu Lansia	Klegung
16	Suyatmi	Kader Yandu Lansia	Klegung
17	Partini	Kader Yandu Lansia	Gunungasem
18	Suratmi	Kader Yandu Lansia	Gunungasem
19	Supiyah	Kader Yandu Lansia	Gunungasem
20	Anik Susilowati	Kader Yandu Lansia	Gunungasem
21	Oki Puspasari	Kader Yandu Lansia	Salaran
22	Sutami	Kader Yandu Lansia	Salaran
23	Tugiyem	Kader Yandu Lansia	Salaran
24	Mardiyanti	Kader Yandu Lansia	Salaran
25	Supi Hartini	Kader Yandu Lansia	Senggotan
26	Sulastri	Kader Yandu Lansia	Senggotan
27	Nanik Sumarni	Kader Yandu Lansia	Senggotan
28	Uswatun Khasanah	Kader Yandu Lansia	Senggotan
29	Ramini	Kader Yandu Lansia	Soka
30	Lilis Kadarsih	Kader Yandu Lansia	Soka
31	Setyaningsih	Kader Yandu Lansia	Soka
32	Waljirah	Kader Yandu Lansia	Soka
33	Jumiyati	Kader Yandu Lansia	Jatikuning
34	Eni Ruswidiyanti	Kader Yandu Lansia	Jatikuning
35	Rumini	Kader Yandu Lansia	Jatikuning
36	Emi Astuti	Kader Yandu Lansia	Jatikuning

Pertemuan kader rutin juga dilaksanakan bulanan setiap tanggal 15 (lima belas) bulan bersangkutan di tingkat kalurahan.

d. LPMP (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Padukuhan)

LPMP merupakan lembaga yang berkedudukan di padukuhan sebagai mitra Dukuh dalam pemberdayaan masyarakat Padukuhan. Adapun Ketua LPMP di Kalurahan Ngoro-oro adalah sebagai berikut :

No	Nama	Alamat	Jabatan
1	JASWANTO	Tawang	Ketua
2	AGUS SUBAGIYO	Sepat	Ketua
3	WAGIRAN	Gembyong	Ketua
4	GIYO SAPUTRO	Klegung	Ketua
6	PARYONO	Gunungasem	Ketua
6	SUYONO	Salaran	Ketua
7	BADRI	Senggotan	Ketua
8	PURWANTO	Soka	Ketua
9	SUKIRDI	Jatikuning	Ketua

e. LPMK (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan)

LPMK merupakan salah satu dari 7 lembaga kemasyarakatan yang ada di kalurahan Ngoro-oro yang fungsinya sebagai mitra Pemerintah Kalurahan dalam perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan. Selain itu tugas LPMK ialah menggerakkan dan menggali partisipasi aktif serta swadaya gotong royong masyarakat dalam kegiatan pembangunan di desa.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh LPMK Ngoro-oro antara lain:

1. Menumbuhkembangkan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan.
2. Menggali swadaya murni masyarakat kalurahan untuk mengimbangi bantuan.
3. Penyusunan perencanaan pembangunan melalui forum musrenbang kalurahan.
4. Pelaksanaan kegiatan pembangunan desa baik berupa kegiatan swakelola dan pembangunan swadaya murni masyarakat.
5. Monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan kalurahan.

Adapun kepengurusan LPMK Ngoro-oro adalah sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Alamat
1	SUJIMAN	Ketua	Salaran
2	TARYONO	Wakil Ketua	Tawang
3	ALI NASHRUN	Sekretaris	Jatikuning
4	JUMARNO	Bendahara	Soka
5	SUKARDI	Koord.Sie.Praswil	Sepat
6	JIMAN	Anggota	Jatikuning
7	SUGIYONO	Anggota	Gembyong
8	SUWARDI	Koord.Sie.Perekonomian	Gunungasem
9	SAWITO	Anggota	Tawang
10	GIANTO	Anggota	Gembyong
11	SUKARJO	Koord.Sie.Kamtib	Senggotan
12	NURWIYANTO	Anggota	Soka
13	TUKIJAN	Anggota	Gembyong
14	DWI NUR'AINI	Sie.Pembr. Perempuan	Jatikuning
15	WARTINI	Anggota	Sepat
16	UMI NURJANI	Anggota	Senggotan
17	SUBARJO	Sie.Pemuda dan ORKES	Gunugasem
18	WIDARYANTI	Anggota	Jatikuning
19	RIYANTO	Anggota	Klegung

f. KARANG TARUNA

Peran dan fungsi karangtaruna dalam upaya memberdayakan masyarakat khususnya kaum remaja dan pemuda di kalurahan sangat penting. Sehingga kaum remaja sebagai generasi muda calon penerus bangsa harus memiliki kegiatan, semangat dalam rangka pemberdayaan khususnya generasi muda. Kegiatan karang taruna Persada Kalurahan Ngoro-oro selama ini antara lain :

- Pertemuan atau rapat rutin setiap bulan yang dilaksanakan di Balai Kalurahan.
- Mengadakan pertemuan dengan karangtaruna sub Padukuhan.

- Peningkatan pengetahuan dengan mengikuti pelatihan, seminar dan sosialisasi program seperti:
 - Pembinaan tentang bahaya narkoba
 - Pelatihan dan pendampingan TPA
 - Pendampingan dan Literasi

Kepengurusan Karang Taruna Kalurahan Ngoro-oro adalah sebagai berikut :

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1	NUR TAUFIQ	Ketua	Gunungasem
2	LATIFA NUR MAHMUDA	Wakil Ketua	Jatikuning
3	DIMAS AJI PUTRANTO	Sekretaris	Gunungasem
4	VIKA ASTUTI	Wakil Sekretaris	Sepat
5	TITAN MARTHA ADYATAMA	Bendahara	Sepat
6	RACHMAT RENDHY HARTANTO	Wakil Bendahara	Jatikuning
7	ICHA YUSIANA	Koordinator Seksi Pendidikan dan Latihan	Gunungasem
8	SEPTIANA WULANDARI	Anggota	Sepat
9	EBILIO	Anggota	Gembyong
10	AGUNG PRASTYA W.	Anggota	Tawang
11	SITI FATIMAH	Anggota	Gembyong
12	DHONI WAHYU PRATAMA	Koordinator Seksi Usaha Kesejahteraan Sosial	Sepat
13	RUDIYANTO	Anggota	Sepat
14	ISNAN FAHUZI	Anggota	Jatikuning
15	EKO HARYONO	Anggota	Sepat
16	ALI NASHRUN	Anggota	Jatikuning
17	MIFTAAH TOOHHAA	Koordinator Seksi Kelompok Usaha Bersama	Gunungasem
18	ANDI EKA SETYAWAN	Anggota	Gunungasem
19	AGUS TRIYANTO	Anggota	Sepat
20	YATIMIN	Anggota	Salaran
21	FAHRUDIN	Anggota	Jatikuning
22	TOTOK GIYONO	Koordinator Seksi Kerohanian dan Pembinaan Mental	Salaran
23	SUGIYANTO	Anggota	Salaran
24	SUPRANOLO	Anggota	Klegung
25	HERI SETIAWAN	Anggota	Soka
26	ANDI SETYAWAN	Koordinator Seksi Olah Raga dan Seni Budaya	Jatikuning
27	DELIMA SAKTIANA P.	Anggota	Gunungasem
28	NIKEN AULIA SASMITA	Anggota	Gunungasem
29	ELI SUHELI	Anggota	Salaran
30	KUSDIYONO	Anggota	Soka
31	NANANG PRASETYO	Koordinator Seksi Lingkungan Hidup	Salaran
32	FITRIANA DEWI	Anggota	Jatikuning

33	TOTOK TUWUH M.	Anggota	Salaran
34	BAYU JIHAD P.	Anggota	Klegung
35	ARWAN SUBEKTI	Koordinator Seksi Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Kemitraan	Gembyong
36	M APRIYANTO	Anggota	Senggotan
37	SUTARTO	Anggota	Senggotan
38	AGUS SUSILO	Anggota	Gunungasem

4. Kinerja pemerintahan

Untuk melaporkan kinerja pemerintahan belum dapat disajikan, karena untuk mengukur (instrument kinerja) yang belum ada. Sehingga evaluasi tentang akuntabilitas kinerja tidak diketahui.

BAB III
POTENSI DAN MASALAH

Gambaran umum kondisi Kalurahan Ngoro-oro berdasarkan hasil pengkajian Kalurahan secara partisipatif, secara rinci telah diperoleh informasi tentang potensi-potensi dan masalah-masalah yang dihadapi oleh Kalurahan Ngoro-oro. Adapun program pembangunan yang dilakukan selama ini pada hakikatnya merupakan upaya untuk menjawab tantangan atau masalah-masalah dengan memanfaatkan potensi yang ada di Kalurahan Ngoro-oro.

A. Potensi

Potensi-potensi sumber daya alam, sosial, maupun manusia secara umum yang ada di Kalurahan Ngoro-oro adalah sebagai berikut :

1. Wilayah Desa Ngoro-oro 753,7909 ha atau 7,539 km²
2. Jumlah Penduduk tahun 2025 (per 30 Juni) sejumlah 3.663 jiwa, dengan persentase penduduk usia produktif (15 – 59 th) berjumlah 47 % (1.722) yang merupakan potensi tenaga kerja.
3. Potensi pertanian termasuk di dalamnya perkebunan, peternakan, dan perikanan darat.
4. Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) antara lain pengolahan hasil pertanian yang berbentuk makanan olahan serta pengolahan kayu.
5. Letak wilayah yang sangat indah dan dibukanya jalan jalur penghubung kabupaten (keluar tol Prambanan, Sleman menuju Gunungkidul) untuk dikembangkan menjadi obyek wisata.
6. Perilaku masyarakat yang ulet, pekerja keras, gotong-royong dan hidup hemat.

Disamping itu hasil pengkajian kalurahan secara partisipatif menunjukkan informasi tentang potensi-potensi Kalurahan Ngoro-oro yang lebih rinci sebagai berikut :

METODE	GAMBARAN POTENSI
1. Transaksi/Jelajah Wilayah	1. Padukuhan Senggotan, Gunungasem, Sepat, Gembyong dan Tawang terdapat sumber mata air yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari. 2. Di lima padukuhan tersebut sebagian sawahnya masih dapat ditanami 2 (dua) kali dalam satu tahun, yang hamper sebagian besar masih dengan system tadah hujan. 3. Petani menanam rumput jenis kolonjono/gajah/odot dll di pematang sawah untuk pakan ternak, pada musim kemarau sawah-sawah sebagian besar ditanami kacang hijau dan sayur-sayuran. 4. Untuk ladang/tegalan dimanfaatkan para petani untuk ditanami ketela dan palawija yang sesuai dengan keadaan.

	5. Dilingkungan rumah pekarangan ditanami kakao yang hasilnya cukup memuaskan para petani. 6. Kalurahan Ngoro-oro juga ada hutan rakyat yang dimiliki oleh individu yang ditanami pohon jati, sengan laut, sono keling, akasia, jambu mete juga terdapat beberapa hewan. 7. Hasil dari hutan rakyat tersebut di gunakan untuk kebutuhan kehidupan sehari-hari serta dimanfaatkan untuk perabotan rumah tangga dan kayu bakar. 8. Jalan yang menghubungkan antar padukuhan hamper semua telah diperkeras (aspal dan rabat beton). Namun pada saat ini beberapa ruas jalan aspal/cor sudah rusak yang perlu rehabilitasi. 9. Pada musim kemarau sebagian besar masyarakat menggunakan air untuk kebutuhan MCK dengan spam dan mata air yang ada dan sebagian kecil membeli untuk kebutuhan sehari-hari; tahun 2015 di padukuhan Jatikuning dibangun sumur bur dalam, tahun 2017 di Padukuhan Soka dibangun sumur bur dalam, berturut-turut dibeberapa padukuhan juga dibangun sumur boor dalam yaitu tahun 2024 di Klegung dari Kemenhan, di Gunungasem dari Koperasi Beringharjo, di Salaran dari BPBD, di tahun 2025 di Gembyong dan di Sepat dari DPUPR dengan Dana Keistimewaan, sekarang kebutuhan akan air hampir tercukupi. 10. Sebagian besar penduduk Kalurahan Ngoro-oro bermata pencaharian sebagai petani yang sebagian kecil sebagai buruh tani dan bangunan, pedagang arang dan kayu bakar. Untuk kebutuhan air pertanian di Padukuhan Sepat tahun 2024 telah dibangun sumur boor pertanian dari Dinas Pertanian sejumlah 3 (tiga) titik, yang dapat dimanfaatkan untuk menanam palawija dan sayur-sayuran. 11. Tingkat pendidikan warga Kalurahan Ngoro-oro kebanyakan adalah SD dan SLTP. 12. Disamping pertanian, sebagian penduduk beternak sapi, kambing, ayam dan lain sebagainya.
--	--

	13. Prasarana pendidikan formal adalah 2 SD Negeri yaitu SD Ngoro-oro dan SD Soka serta SMP N 4 Patuk di Ngoro-oro. 14. Prasarana Ekonomi terdapat pasar yang berada di Padukuhan Tawang yang dimiliki oleh Pemerintah Kalurahan, meskipun belum maksimal karena sarana dan prasarana masih terbatas. Di Kalurahan Ngoro-oro juga telah terbentuk Koperasi Merah Putih meskipun belum maksimal. 15. Sarana Kesehatan terdapat Puskesmas Patuk II di Padukuhan Tawang, dan yang akan terwujud segera adalah pembangunan Rumah Sakit didekat puskesmas.
2. Kalender Musim	<i>Musim Kemarau (bulan Mei – Nopember)</i> 1. Petani persiapan pupuk kandang (kompos) 2. Petani membuat arang untuk kebutuhan sehari-hari 3. Tenaga kerja keluar daerah untuk menambah penghasilan 4. Petani menjual kayu bakar 5. Petani menjual hasil bumi seperti ketela dan pisang 6. Petani menjual sayur-sayuran 7. Petani menjual buah-buahan dsb. <i>Musim Penghujan (bulan Desember – April)</i> 1. Petani persiapan lahan pertanian 2. Petani mulai menanam jagung, kacang, ketela dan padi 3. Petani mulai pemupukan tanaman pertanian 4. Petani menuai hasil pertaniannya 5. Petani menyetok hasil pertaniannya. 6. Buruh tani berkonsentrasi dalam mengerjakan pertaniannya.
3. Peta Sketsa Desa	<i>Padukuhan Tawang</i> 1. Sumber air berasal dari belik dan penampungan air hujan 2. Sebagian hutan yang terdapat tanaman keras (kayu jati, sengon laut, sono keling, akasia, mahoni dsb) 3. Buah-buahan terdapat rambutan dan durian, alpukat 4. Tanaman obat keluarga/empon-empon (jahe, kunyit, lengkuas, kencur dll) 5. Peternakan terdapat peternakan sapi, kambing dan ayam. 6. Pertanian juga terdapat lahan persawahan dan ladang

	7. Mata Pencaharian kebanyakan petani dan ada pedagang, PNS. 8. Jumlah Penduduk : 244 jiwa dan terdiri dari 71 KK. <i>Padukuhan Sepat</i> 1. Sumber air dari sumber mata air yang dialirkan menggunakan pompa air dan dari sumur bur, tahun ini dibuat sumur bur dalam. 2. Sebagian hutan yang terdapat tanaman keras (kayu jati, sengon laut, sono keling, akasia, mahoni dsb) 3. Buah-buahan terdapat rambutan, petai dan manga, alpukat 4. Tanaman obat keluarga/empon-empon (jahe, kunyit, lengkuas, kencur dll) 5. Peternakan terdapat peternakan sapi dan kambing 6. Pertanian juga terdapat lahan persawahan dan lading 7. Terdapat sumur boor pertanian 8. Mata pencaharian kebanyakan adalah petani dan sebagian kecil pedagang dan ada PNS. 9. Jumlah Penduduk : 313 jiwa dan terdiri dari 98 KK <i>Padukuhan Gembyong</i> 1. Sumber air dari sumber mata air yang dapat dialirkan tanpa menggunakan pompa air (grafitasi), dan pada tahun ini sudah dibangun sumur boor dalam. 2. Sebagian hutan yang terdapat tanaman keras (kayu jati, sengon laut, sono keling, akasia, mahoni dsb) 3. Buah-buahan terdapat rambutan, alpukat 4. Tanaman obat keluarga/empon-empon (jahe, kunyit, lengkuas dll) 5. Peternakan terdapat peternakan sapi dan kambing 6. Pertanian juga terdapat lahan persawahan dan ladang 7. Mata pencaharian kebanyakan petani, sebagian kecil pedagang dan ada TNI 8. Jumlah Penduduk : 287 jiwa dan terdiri dari 96 KK <i>Padukuhan Klegung</i> 1. Sumber air dari sumber mata air dan sumur serta tahun 2024 telah dibangun sumur boor dalam
--	---

	2. Sebagian hutan yang terdapat tanaman keras (kayu jati, sengon laut, sono keling, akasia, mahoni dsb) 2. Buah-buahan terdapat rambutan, manga dan alpukat 3. Tanaman obat keluarga/empon-empon (jahe, kunyit, lengkuas, kencur dll) 4. Peternakan terdapat peternakan sapi dan kambing 5. Pertanian juga terdapat lahan persawahan dan ladang 6. Mata pencaharian adalah petani dan pedagang ada TNI 7. Jumlah Penduduk : 230 jiwa dan terdiri dari 87 KK <i>Padukuhan Gunungasem</i> 1. Sumber mata air dari sumber mata air yang dialirkan menggunakan pompa air serta PAH dan di tahun 2024 telah dibangun sumur boor dalam. 2. Sebagian hutan yang terdapat tanaman keras (kayu jati, sengon laut, sono keling, akasia, mahoni dsb) 3. Buah-buahan terdapat rambutan dan durian, alpukat. 4. Tanaman obat keluarga/empon-empon (jahe, kunyit, lengkuas, kencur dll) 5. Peternakan terdapat peternakan sapi, kambing dan ayam ras 6. Pertanian juga terdapat lahan persawahan dan ladang 7. Mata pencaharian adalah petani dan pedagang, ada Polri 8. Jumlah Penduduk : 384 jiwa dan terdiri dari 107 KK. <i>Padukuhan Salaran</i> 1. Sumber air dari sumber mata air dan belik, sumur bur, PAH dan sebagian beli 2. Sebagian hutan yang terdapat tanaman keras (kayu jati, sengon laut, sono keling, akasia, mahoni dsb) 3. Buah-buahan terdapat rambutan, durian dan alpukat. 4. Tanaman obat keluarga/empon-empon (jahe, kunyit dll) 5. Peternakan terdapat peternakan sapid an kelompok ternak, kambing dan ikan air tawar 6. Pertanian juga terdapat lahan persawahan dan ladang
--	--

7. Terdapat tanaman Kakao (coklat) dan ada klompoknya
8. Mata pencaharian adalah petani, pegawai swasta, sopir, buruh, PNS
9. Jumlah Penduduk : 482 jiwa dan terdiri dari 151 KK

Padukuhan Senggotan

1. Sumber mata air dari sumber mata air yang dapat dialirkan tanpa menggunakan pompa air (grafitasi) dan menggunakan pompa, terdapat sumur boor dalam
2. Sebagian hutan yang terdapat tanaman keras (kayu jati, sengon laut, sono keling, akasia, mahoni dsb)
3. Buah-buahan terdapat rambutan, durian dan alpukat
4. Tanaman obat keluarga/empon-empon (jahe, kunyit dll)
5. Peternakan terdapat peternakan sapi dan kambing
6. Pertanian juga terdapat lahan persawahan dan ladang
7. Mata pencaharian adalah petani dan merantau keluar daerah
8. Jumlah Penduduk : 297 jiwa dan terdiri dari 99 KK

Padukuhan Soka

1. Sumber mata air dari sumber mata air belik, sumur, PAH, sumur bur, spam dan sebagian beli
2. Sebagian hutan yang terdapat tanaman keras (kayu jati, sengon laut, sono keling, akasia, mahoni dsb)
3. Buah-buahan terdapat rambutan, durian dan alpukat
4. Terdapat tanaman kakao (coklat) dan ada kelompoknya
5. Peternakan terdapat peternakan sapi, kambing, ayam ras dan ikan air tawar
6. Pertanian juga terdapat lahan persawahan dan ladang
7. Mata pencaharian sebagian petani dan buruh serta PNS
8. Jumlah Penduduk : 677 jiwa dan terdiri dari 212 KK

Padukuhan Jatikuning

1. Sumber mata air dari sumber, belik, sumur, PAH dan sumur bur (spam)

	2. Sebagian hutan yang terdapat tanaman keras (kayu jati, sengon laut, sono keling, akasia, mahoni dsb) 3. Buah-buahan terdapat rambutan, durian dan alpukat 4. Peternakan terdapat peternakan sapi, kambing dan kelompok ternak dan ayam ras 5. Pertanian juga terdapat lahan persawahan dan ladang 6. Mata pencaharian petani, buruh, pedagang, pegawai swasta/PNS dan ada Polri 7. Jumlah Penduduk : 749 jiwa dan terdiri dari 238 KK
4. Bagan Kelembagaan	1. Desa Ngoro-oro organisasi/lembaga yang aktif dan mempunyai peran terhadap masyarakat adalah RT/RW, LPMP, LPMD, PKK, Karang Taruna, LINMAS beserta Pemerintah Desa dan BPD serta Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama.

B. Masalah

Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kalurahan Ngoro-oro yang perlu ditangani segera adalah sebagai berikut :

- 1. Data penduduk miskin tahun 2025 sejumlah 165 orang/kk (data standar BPS) tetapi faktanya lebih banyak dilihat dari daya beli masyarakat yang semakin lemah.
- 2. Air bersih, yang pada musin kemarau fakta dilapangan masih terdapat beberapa warga kesulitan air juga perlu penanganan yang tidak kalah pentingnya.
- 3. Lahan persawahan yang menggantungkan pada curah hujan.
- 4. Pakan ternak yang pada musim kemarau sangat sulit perlu ada solusi.
- 5. Perikanan darat juga perlu adanya pemecahan untuk meningkatnya budi daya ikan.
- 6. Tingkat Pendidikan yang masih perlu peningkatan sarana dan prasarana serta penyadaran akan pentingnya pendidikan untuk masa depan.
- 7. Prasarana infrastruktur terutama jalan-jalan yang sudah waktunya rehabilitasi kembali karena banyak ruas yang rusak perlu bantuan dan penanganan yang segera dilakukan.
- 8. Pertanahan yang masih banyak belum bersertifikat sehingga perlu adanya bantuan dari pemerintah untuk meringankan biaya pensertifikatan.
- 9. Kamtibmas perlu adanya penanganan, terutama LINMAS yang kemampuannya kurang maksimal/ profesional.
- 10. Sampah rumah tangga yang semakin hari semakin sulit ter tangani, karena pola hidup masyarakat yang semakin banyak bergantung pada produk yang sulit untuk di daur ulang dan kesadaran menjaga lingkungan yang semakin hari semakin rendah.

Disamping itu hasil pengkajian kalurahan secara partisipatif menunjukkan informasi tentang masalah-masalah yang ada di Wilayah Kalurahan Ngoro-oro dengan rincian sebagai berikut :

METODE	GAMBARAN MASALAH
1. Jelajah Wilayah	1. Air bersih di sebagian padukuhan pada musim kemarau masih ada warga yang kurang, sehingga harus beli/minta bantuan. 2. Persawahan di musim kemarau kebanyakan kering tidak dapat ditanami karena tidak ada irigasi dan sungai kering. 3. Kesuburan tanah sawah maupun ladang menurun setelah petani menggunakan pupuk kimia. 4. Hama tanaman seperti tikus, wereng, walang, sundep dan ulat menjadi tantangan para petani. 5. Hutan rakyat juga banyak kendala dengan adanya hama seperti ulat, tupai, jamur kayu beracun (tajin, upas, dipo). 6. Peternakan juga banyak tantangan karena penyakit pmk, lato-lato bagi peternak sapi dan kambing serta ces pada peternak ayam buras. 7. Jalan-jalan aspal di tiap padukuhan banyak yang sudah rusak. 8. Jalan masuk kerumah-rumah /gang masuk banyak tanah sehingga pada musim hujan jalan becek. 9. Pasar kalurahan yang belum maksimal dari segi sarana dan prasarana serta aktifitas perdagangan yang terbatas bahkan cenderung berhenti sehingga para petani untuk menjual hasil pertanian harus ke pasar yang cukup jauh. 10. Peternakan ayam ras juga menimbulkan masalah karena mengakibatkan bau yang tidak sedap juga lalat. 11. Batas tanah banyak masalah karena belum semuanya disertifikat.
2. Peta Sketsa Kalurahan	<i>Padukuhan Tawang</i> 1. Air berkurang pada musim kemarau akibat gempa yang sudah beberapa tahu lalu 2. Tanahnya berbukit 3. Banyak batu-batu besar 4. Kurangnya lapangan kerja 5. Kurangnya sumber pakan ternak dimusim kemarau 6. SDM rendah 7. Ancaman tanah longsor dan kekeringan <i>Padukuhan Sepat</i> 1. Sawah kebanyakan kering pada musim kemarau 2. Tanah padas putih 3. Kurangnya lapangan kerja 4. SDM rendah 5. Kurangnya sumber pakan ternak pada musim kemarau <i>Padukuhan Gembyong</i> 1. Tanahnya berbukit 2. Banyak batu-batu besar

	3. Kurangnya lapangan kerja 4. Kurangnya sumber pakan ternak dimusim kemarau 5. SDM rendah 6. Ancaman tanah longsor
	<i>Padukuhan Klegung</i> 1. Sebagian air berkurang pada musim kemarau 2. Tanahnya berbukit 3. Banyak batu-batu besar 4. Kurangnya lapangan kerja 5. Kurangnya sumber pakan ternak dimusim kemarau 6. SDM rendah 7. Ancaman tanah longsor dan kekeringan
	<i>Padukuhan Gunungasem</i> 1. Air berkurang pada musim kemarau 2. Tanahnya berbukit 3. Banyak batu-batu besar 4. Kurangnya lapangan kerja 5. Kurangnya sumber pakan ternak dimusim kemarau 6. SDM rendah 7. Ancaman tanah longsor dan kekeringan
	<i>Padukuhan Salaran</i> 1. Air berkurang pada musim kemarau akibat gempa 2. Tanahnya berbukit 3. Banyak batu-batu besar 4. Kurangnya lapangan kerja 5. Kurangnya sumber pakan ternak dimusim kemarau 6. SDM rendah 7. Ancaman tanah longsor dan kekeringan
	<i>Padukuhan Senggotan</i> 1. Tanahnya berbukit 2. Banyak batu-batu besar 3. Kurangnya lapangan kerja 4. Kurangnya sumber pakan ternak dimusim kemarau 5. SDM rendah 6. Ancaman tanah longsor dan kekeringan
	<i>Padukuhan Soka</i> 1. Kekurangan air pada musim kemarau akibat gempa 2. Tanahnya berbukit 3. Banyak batu-batu besar 4. Kurangnya lapangan kerja 5. Kurangnya sumber pakan ternak dimusim kemarau 6. SDM rendah 7. Ancaman tanah longsor dan kekeringan
	<i>Padukuhan Jatikuning</i> 1. Kekurangan air pada musim kemarau akibat gempa 2. Tanahnya berbukit 3. Banyak batu-batu besar 4. Kurangnya lapangan kerja 5. Kurangnya sumber pakan ternak dimusim kemarau

	6. SDM rendah 7. Ancaman tanah longsor dan kekeringan
3. Kalender Musim	<i>Musim Kemarau (bulan Mei – Nopember)</i> 1. Kekurangan air 2. Harga jual palawija terutama ketela rendah 3. Kekurangan pakan ternak 4. Harga jual ternak murah 5. Harga jual buah-buahan murah dsb. <i>Musim Penghujan (bulan Desember – April)</i> 1. Harga benih mahal 2. Pupuk sulit didapat dan harganya mahal 3. Penjualan hasil pertanian murah 4. Sulit mengeringkan hasil panen 5. Transportasi hasil panen sulit
4. Bagan Kelembagaan	1. Bamuskal dirasa kurang berperan aktif dalam menjalankan tugas 2. Karang Taruna tingkat Kalurahan belum optimal dalam perannya sebagai wadah generasi muda karena anggaran yang terbatas. 3. Keberadaan LPMK dan LPMP juga belum berperan maksimal/aktif dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. 4. RW dirasakan tidak ada fungsinya karena perannya sama dengan Dukuh.

BAB IV

RPJM KALURAHAN

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kalurahan memerlukan satu filosofi pembangunan sebagai suatu cita-cita luhur yang memiliki pandangan luas dan dapat menjadi pedoman dan tujuan bagi Kalurahan dalam menetapkan Visi dan Misi serta tujuan pembangunan.

Filosofi pembangunan Kalurahan Ngoro-oro merangkum filosofi daerah Kabupaten Gunungkidul yang digali dari khasanah budaya luhur bangsa Indonesia, yaitu DHAKSINARGA BHUMIKARTA. *Dhaksinarga* berasal dari kata-kata *Dhaksina* yang berarti “Selatan” dan *Arga* yang berarti “Gunung”, yang kemudian dirangkai menjadi satu kata *Dhaksinarga* yang artinya Gunungkidul. *Bhumikarta* berasal dari kata-kata *Bhumi* yang bermakna “bumi, tanah, daerah” dan *Karta* yang bermakna “Subur, makmur, rahayu, damai dan sejahtera”.

Dengan demikian filosofi pembanguna Kabupaen Gunungkidul, DHAKSINARGA BHUMIKARTA, merupakan tekad masyarakat Gunungkidul untuk senantiasa ingin mewujudkan suatu semboyan yang mengandung harapan agar Gunungkidul menjadi daerah yang subur dan makmur dengan cara melaksanakan pembangunan di segala bidang berlandaskan Hasta Dharma.

Adapun Hasta Dharma merupakan amanah yang harus dilaksanakan oleh setiap pemimpin dan aparatur Daerah Kabupaten Gunungkidul, yaitu :

- (1) Pengayoman seluruh rakyat tanpa membedakan golongan aliran dan agama,
- (2) Pemberi petunjuk dan bimbingan kepada rakyat menuju ketertiban dan keamanan umum,
- (3) Penyuluh di dalam gelap dan penolong di dalam penderitaan bagi seluruh lapisan masyarakat, sehingga tercapai ketenangan dan ketentraman lahir dan batin,
- (4) Pembina semangat kehidupan masyarakat sehingga terjelma sifat dan sikap dinamis, konstruktif dan korektif,
- (5) Pembangkit dan pemupuk daya cipta menuju kearah kesejahteraan masyarakat,
- (6) Bersifat sabar, tekun, ulet dan bijaksana agar dapat menampung dan mencarikan penjelasan segala persoalan hidup dan kehidupan rakyat sehari-hari,
- (7) Penggerak segala kegiatan masyarakat menuju tercapainya masyarakat adil makmur yang diridhoi Tuhan Yang Maha Esa, dan
- (8) Pemberantas kejahatan dan kemaksiatan dengan jelas bertindak tegas, adil, dan jujur tanpa pandang bulu dan harus menjadi teladan di dalam kebaikan lahir, batin bagi masyarakat.

A. Visi dan Misi

Visi

Visi adalah hal yang diinginkan pada akhir periode perencanaan yang kondisinya direpresentasikan dalam sejumlah sasaran hasil pembangunan yang dicapai melalui program-program pembangunan dalam bentuk rencana kerja. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Ngoro-oro Tahun 2019–2026 yaitu :

MEWUJUDKAN MASYARAKAT NGORO-ORO YANG MAJU, DAMAI DAN SEJAHTERA.

Penjelasan Visi

“Mewujudkan masyarakat” adalah upaya untuk melaksanakan /mencita-citakan kelompok manusia yang hidup bersama-sama di suatu tempat dan saling berinteraksi dalam komunitas yang teratur, memiliki suatu sistem yang mengatur hubungan antar individu dan secara kodrati saling membutuhkan satu sama lainnya.

“Maju” adalah usaha/upaya untuk menjadikan masyarakat yang lebih baik, mencapai atau berada pada tingkatan peradapan yang lebih tinggi, utamanya dalam pendidikan, ekonomi, keagamaan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan serta bidang lainnya.

“Damai” adalah sebuah harmoni dalam kehidupan alami antar manusia di mana tidak ada perseteruan, kekerasan ataupun konflik.

“Sejahtera” adalah suatu keadaan masyarakat Kalurahan Ngoro-oro yang aman sentosa dan makmur serta selamat terlepas dari gangguan.

Rangkuman Penjelasan Visi

Perwujudan kalurahan yang mencapai tingkat peradapan lebih tinggi, masyarakatnya harmonis dimana tidak ada perseteruan, kekerasan atau konflik, aman dan makmur serta terlepas dari gangguan maupun bencana.

Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan Pemerintah Kalurahan untuk mewujudkan Visi. Selanjutnya, berdasarkan visi desa tersebut di atas, ditetapkan 7 (tujuh) misi Pembangunan Kalurahan 2019 – 2026, yaitu :

- 1) Meningkatkan kinerja perangkat sesuai Standar Operasional dan Prosedur.
- 2) Menyelenggarakan kegiatan pemerintahan kalurahan secara terbuka dan menyeluruh.
- 3) Memberikan pelayanan kepada seluruh lapisan masyarakat dengan mudah, cepat dan tepat sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Meningkatkan sumber daya masyarakat dalam bidang pendidikan dan kesehatan.
- 5) Mengangkat potensi lokal pertanian, perkebunan dan peternakan sebagai daya dukung ekonomi masyarakat serta pemerataan pembangunan yang berkeadilan.
- 6) Mengangkat seni budaya dan meningkatkan perikehidupan kegamaan.
- 7) Mengembangkan dan meningkatkan sektor pariwisata untuk kemakmuran masyarakat.

Penjelasan masing-masing Misi

Misi Kesatu

Merupakan upaya Pemerintah Kalurahan Ngoro-oro untuk meningkatkan kualitas serta kemampuan perangkat desa untuk dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara profesional meliputi peningkatan kapasitas dan kualitas serta kopentesi SDM Pamong Kalurahan dalam melaksanakan Perencanaan, Pengawasan, Kesadaran dan ketaatan terhadap aturan, sistim keuangan dan pengelolaan Kekayaan Asli Kalurahan sesuai dengan perundang-undangan.

Misi Kedua

Merupakan upaya Pemerintah Kalurahan Ngoro-oro dalam mewujudkan asas keterbukaan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, mengoptimalkan jalinan komunikasi dengan elemen kelembagaan kalurahan supaya tercipta sinergi antara pemerintah kalurahan dengan kelembagaan kalurahan yang ada.

Misi Ketiga

Merupakan upaya Pemerintah Kalurahan Ngoro-oro dalam mewujudkan pelayanan secara maksimal terhadap masyarakat yang meliputi pelayanan perihal administrasi umu dan kependudukan serta pelayanan perihal sosial kemasyarakatan.

Misi Keempat

Merupakan upaya Pemerintah Kalurahan Ngoro-oro dalam mewujudkan masyarakat yang sehat dan cerdas dengan meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan dan menjaga perilaku hidup sehat yang meliputi penuntasan wajib belajar 9 (sembilan), penyediaan fasilitas pendidikan, pelaksanaan jam belajar masyarakat, penyuluhan kesehatan, penyediaan fasilitas kesehatan serta pemberian pelatihan kader dan insentif kader kesehatan.

Misi Kelima

Merupakan upaya Pemerintah Kalurahan Ngoro-oro untuk mewujudkan kemandirian dan meningkatkan perekonomian masyarakat, yang meliputi usaha pelatihan kewirausahaan, pelatihan koperasi/UMKM, pencegahan terhadap jeratan rentenir dan pelatihan pengembangan jaringan pemasaran.

Misi Keenam

Merupakan upaya Pemerintah Kalurahan Ngoro-oro untuk mewujudkan masyarakat yang mencintai seni budaya dengan tetap berpegang teguh terhadap ajaran dan nilai-nilai agama yang dianutnya, yang meliputi pelatihan kesenian bagi masyarakat, pemberian insentif pelatih, melaksanakan perayaan hari besar keagamaan, pelatihan/pembinaan ustadz/ustadzah, pembinaan/pelatihan rois.

Misi Ketujuh

Merupakan upaya Pemerintah Kalurahan Ngoro-oro untuk mewujudkan masyarakat yang lebih makmur dengan menggali dan mengeksplorasi potensi pariwisata, yang meliputi peningkatan profesionalisme pengurus dan pengelola pariwisata, penyempurnaan sarana dan prasarana pendukung unit wisata, pembukaan obyek wisata baru dan kerjasama dengan investor/pihak lain untuk pengembangan wisata.

Misi ini merupakan upaya Pemerintah Kalurahan Ngoro-oro untuk menjadikan masyarakat mencapai tingkat peradapan lebih tinggi, secara harmonis dimana tidak ada perseteruan, kekerasan atau konflik, aman dan makmur serta terlepas dari gangguan maupun bencana.

B. Arah Kebijakan Pembangunan Kalurahan

Arah kebijakan pembangunan kalurahan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi dimaksimalkan memenuhi target dan kinerja yang telah

ditetapkan dalam RPJM Kalurahan pada setiap tahunnya. Cakupan kebijakan strategis/prioritas kalurahan selama 8 tahun adalah :

1. Pemberdayaan masyarakat.
Adalah kegiatan yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat, yaitu berupa kegiatan yang terhimpun di bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan bidang Pemberdayaan Masyarakat. Untuk penbiayaan/anggarannya di bidang Pembinaan Kemasyarakatan menggunakan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi, Pendapatan Asli Kalurahan dan Pendapatan Lainnya, sedang di bidang Pemberdayaan menggunakan Dana Desa.
2. Pelayanan publik.
Adalah kegiatan yang berhubungan dengan kompetensi pamong kalurahan dan sarana infrastruktur kalurahan yang ada, yaitu kegiatan yang terhimpun di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan dan bidang Pelaksanaan Pembangunan. Untuk pembiayaan/anggarannya di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan menggunakan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi, Dana Keistimewaan serta Pendapatan Lainnya, sedang di bidang Pelaksanaan Pembangunan menggunakan Dana Desa.
3. Ekonomi kalurahan.
Adalah kegiatan untuk meningkatkan taraf perekonomian masyarakat, yaitu kegiatan yang terhimpun di bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan dan bidang Pemberdayaan Masyarakat. Untuk pembiayaan/anggaran di kedua bidang ini lebih banyak dengan Dana Desa kemudian dana yang bersumber dari Bantuan Keuangan Kabupaten.
4. Tata kelola pemerintahan kalurahan.
Adalah sistem dan proses pengelolaan dan pengaturan penyelenggaran urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat ditingkat kalurahan yang meliputi pengawasan atas sumber daya dan kebijakan dengan melibatkan lurah dan pamongnya untuk mencapai efektif dan akuntabilitas pemerintahan. Kegiatannya terdapat di bidang Penyelenggaran Pemerintahan Kalurahan dan bidang Pemberdayaan Masyarakat. Untuk pembiayaan/anggaran menggunakan semua sumber dana selain yang diakecualikan penggunaan sesuai dengan ketentuan peraturan.
5. Reformasi Kalurahan
Adalah sebagai salah satu misi pembangunan DIY untuk meningkatkan kualitas hidup, kehidupan dan penghidupan masyarakat, pembangunan yang inklusif dan pengembangan kebudayaan. Kegiatannya terdapat/mencakup pada semua bidang/ 4 (empat) bidang yang ada. Untuk pembiayaan/anggaran sepenuhnya dengan Dana Keistimewaan.

C. Strategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran

Dalam rangka mencapai visi dan misi diperlukan penjabaran strategi, pencapaian, tujuan dan sasaran sebagaimana tersebut :

Tujuan	Sasaran	Strategi	Indikator
Mewujudkan Pamong Kalurahan yang sadar dan berkapasitas sesuai dengan tupoksi masing-masing	Meningkatnya profesionalisme dan akuntabilitas Pamong	Peningkatan kapasitas Pamong	% tertib administrasi

Mewujudkan pengelolaan keuangan kalurahan yang sesuai standar kompetensi	Terwujudnya pengelolaan keuangan yang akuntabel	Pelatihan pengelolaan keuangan	% tertib adm. keuangan
Mewujudkan peran serta aktif lembaga kalurahan dan lembaga kemasyarakatan yang ada di kalurahan Ngoro-oro	Meningkatnya akuntabilitas lembaga	Peningkatan Kapasitas Lembaga	% tertib administrasi
Mewujudkan sinergi antara pemerintah dengan lembaga-lembaga yang ada di kalurahan	Meningkatnya akuntabilitas Kalurahan	Peningkatan kapasitas pamong dan lembaga	% tertib administrasi
Mewujudkan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal	Meningkatnya kualitas infrastruktur kalurahan	Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur kalurahan	% penambahan panjang jalan dan prasarana jalan
Mewujudkan masyarakat yang sejahtera dengan pengembangan pendidikan dan kesehatan, dan lingkungan masyarakat	Meningkatnya angka kesehatan dan angka partisipasi sekolah	Bantuan insentif kader kesehatan, pmt anak sekolah, pmt lansia, pelayanan kesehatan	% siswa TK/PAUD, Balita dan kader
Mewujudkan kemandirian masyarakat dalam pemenuhan kesejahteraan dan perekonomian masarakat	Terwujudnya kemandirian ekonomi kalurahan	Penguatan umkm kalurahan	% klompok umkm
Mewujudkan masyarakat yang memegang teguh warisan budaya	Terwujudnya kalurahan budaya	Penguatan pelaku dan pelestari seni budaya	% klompok seni budaya
Mewujudkan masyarakat agamis	Meningkatnya pengamalan peribadatan masyarakat	Stimulan bantuan kegiatan keagamaan	% ustadz/rois
Mengelola obyek wisata secara transparan dan akuntabel	Meningkatnya profesionalitas dan akuntabilitas pariwisata kalurahan	Peningkatan Kapasitas pengelola wisata	% tertib administrasi
Meningkatnya daya tarik dan daya saing pariwisata	Meningkatnya angka kunjungan wisata	Bantuan sarana prasarana pariwisata	% kunjungan wisatawan

Disamping strategi, pencapaian, tujuan dan sasaran diatas, dalam rangka melaksanakan amanat reformasi kalurahan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023, Pemerintah Kalurahan untuk melaksanakan Reformasi Kalurahan melalui penyusunan dan pelaksanaan rencana aksi yang pendanaanya melalui Dana Keistimewaan.

Adapun Rencana aksi Reformasi Kalurahan mencakup Reformasi Birokrasi Kalurahan dan Reformasi Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan. Sasaran kegiatan utama Reformasi Birokrasi yang terdiri 16 (enam belas) kegiatan yaitu : 1) Penguatan Pengelolaan Data dan Informasi Kalurahan; 2) Pengembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Kalurahan; 3) Penguatan Digitalisasi Kalurahan; 4) Penguatan Pengelolaan Keuangan Kalurahan; 5) Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kalurahan; 6) Penguatan Pengelolaan Aset Kalurahan; 7) Penguatan Pelaksanaan penugasan urusan Keistimewaan; 8) Penguatan Tata Naskah Dinas dan Pengelolaan Arsip Dinas Pemerintah Kalurahan; 9) Penguatan Pengendalian Gratifikasi; 10) Penguatan Pengawasan oleh Masyarakat dan Badan Permusyawaratan Kalurahan; 11) Penguatan Regulator Pemerintahan Kalurahan; 12) Pengisian Pamong Kalurahan yang transparan, objektif, akuntabel, dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; 13) Penguatan Kapanewon dan Pemerintahan Kalurahan; 14) Penerapan Budaya Pemerintahan; 15) Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima; dan 16) Pengembangan Inovasi Tata Kelola Pemerintahan dan pelayanan publik Kalurahan.

Sasaran kegiatan utama Reformasi Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari 5 (lima) kegiatan yaitu : 1) Penguatan Kegiatan penanganan stunting; 2) Penguatan kegiatan untuk pendampingan pengembangan kebudayaan; 3) Penguatan kegiatan untuk pembangunan lingkungan yang mendukung perekonomian, sosial dan pengembangan kebudayaan; 4) Penguatan kegiatan pemberdayaan perekonomian; dan 5) Penguatan kegiatan untuk penanganan Kemiskinan.

D. Program Pembangunan di Kalurahan

Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan yang akan dilaksanakan selama periode RPJM Kalurahan, yaitu program prioritas dan kegiatan tahunan yang telah dilaksanakan selama 6 tahun dan tambahan program prioritas dan kegiatan tahunan untuk 2 (dua) tahun selanjutnya kami sajikan dalam format matriks rencana program dan kegiatan yang dapat dipergunakan, selengkapnya pada Tabel IV.1.

BAB V

PENUTUP

Prioritas program dan kegiatan yang direncanakan belum sepenuhnya dapat dilaksanakan secara maksimal karena beberapa saat setelah dilantiknya Lurah terjadi kejadian luar biasa akibat pandemi/wabah Covid-19 yang melanda dunia termasuk Indonesia sehingga beberapa kegiatan yang semestinya dilaksanakan dialihkan untuk penanganan pandemi.

Meskipun Jabatan Lurah ada penambahan jabatan selama 2 (dua) tahun, beberapa kegiatan prioritas awal tidak dapat maksimal dialihkan pada masa penambahan jabatan tersebut karena perubahan kebijakan tentang pembangunan harus menyesuaikan dengan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Umum Bupati. Sehingga penyusunan perencanaan pembangunan kalurahan kurang optimal karena antara kepentingan/kebutuhan masyarakat yang mendesak harus di sesuaikan dengan prioritas pemerintah daerah maupun pusat.

A. Program Transisi

Program jangka pendek jabatan lurah dari 6 (enam) menjad 8 (delapan) tahun sangat terasa bagi masyarakat, karena ada beberapa kebijakan baru yang selama ini sudah baik bagi masyarakat, yaitu dihentikannya program lama dari pemerintah pusat berupa ketahanan pangan yang selama ini langsung dapat dinikmati/dirasakan masyarakat berupa kegiatan-kegiatan bantuan/hibah pertanian, perikanan dan pembinaan serta pelatihan kelompok-kelompok petani dan ekonomi masyarakat karena adanya kebijakan ketahanan pangan dalam bentuk penyertaan modal kepada BUMKAL minimal 20% dari pagu Dana Desa Tahun 2025 cukup terasa bagi masyarakat.

Kebijakan pendirian Koperasi Desa Merah Putih disemua kalurahan terasa sebagai pesaing BUMKAL yang ada karena unit usaha yang ditawarkan hampir sama dan akan berdampak kurang positif untuk Pendapatan Asli Kalurahan. Kebijakan Reformasi Kalurahan yang penggunaannya juga belum maksimal terutama untuk Reformasi Birokrasi karena kebutuhan yang sangat dibutuhkan pemerinrah kalurahan berupa pengadaan alat belum disetujui.

B. Kaidah Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan pembangunan memerlukan perencanaan yang tersusun secara sistematis, agar arah dan tujuan serta capaian pembangunan dapat sesuai sebagai mestinya. Dalam perencanaan perlu disusun dokumen perencanaan kalurahan yaitu RPJM Kalurahan untuk masa jabatan Lurah dan RKP Kalurahan yang merupakan penjabaran RPJM Kalurahan tahunan. Kedua dokumen tersebut membutuhkan keterlibatan masyarakat dan stkholder yang ada di kalurahan mulai dari musyawarah penggalian gagasan, musyawarah kalurahan dan sampai musyawarah perencanaan pembangunan. Dalam pelaksanaan kegiatannya pun membutuhkan keterlibatan masyarakat sebagai sasaran/obyek pembangunan baik sebagai tim pelaksana maupun pekerja (pelaksana pekerjaan), sebagai pengawas dan yang menjaga atau merawat hasil pembangunan.

Berikut tahap-tahap penyusunan Perubahan RPJM Kalurahan yang menempuh langkah-langkah sebagai berikut :

- 1) Pembentukan Tim Penyusun Perubahan RPJM Kalurahan
- 2) Penyelarasan Arah Kebijakan Perencanaan Pembangunan Kabupaten

- 3) Penyelarasan Data Kalurahan.
- 4) Penggalian Gagasan Masyarakat berupa usulan/gagasan program-program pembangunan di masing-masing Padukuhan melalui musyawarah padukuhan (Musdus) yang dihadiri oleh Dukuh, perangkat padukuhan, serta masing-masing perwakilan utusan lembaga-lembaga kemasyarakatan kalurahan di tingkat padukuhan;
- 5) Evaluasi RPJM Kalurahan yang ada.
- 6) Penyusunan Laporan Hasil Pengkajian Keadaan Kalurahan.
- 7) Musyawarah Kalurahan Penyusunan Perubahan RPJM Kalurahan
- 8) Penyusunan Rancangan Perubahan RPJM Kalurahan
- 9) Dalam menyusun rancangan RPJM Kalurahan, Pemerintahan Kalurahan harus memperhatikan secara sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat termasuk pengkajian isu-isu potensi dan masalah Kaluraha, termasuk ancaman, kerentanan, kapasitas, dan risiko bencana.
- 10) Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan Perubahan RPJM Kalurahan.
- 11) Penyajian naskah rancangan Perubahan RPJM Kalurahan untuk dibahas dalam Musyawarah BAMUSKAL pada tahap awal;
- 12) Setelah dilakukan Musrenbang-Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (10), maka Pemerintahan Kalurahan menyelenggarakan rapat paripurna yang dihadiri oleh BAMUSKAL dan Pemerintah Kalurahan dalam acara penetapan persetujuan BAMUSKAL atas rancangan Perubahan RPJM Kalurahan menjadi Perubahan RPJM Kalurahan yang dituangkan dalam Peraturan Kalurahan.
- 13) Setelah mendapat persetujuan BAMUSKAL pemerintahan Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (12) diatas, maka Lurah menetapkan Perubahan RPJM Kalurahan serta memerintahkan Carik untuk mengundangkannya dalam lembaran Kalurahan.

Selanjutnya Perubahan RPJM Kalurahan yang telah ditetapkan dan diundangkan ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan program-program pembangunan di Kalurahan Ngoro-oro selama 8 (delapan) tahun melalui program tahunan berupa Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kalurahan).

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Berita acara Muskal penyusunan perubahan RPJM Kalurahan;
2. SK Lurah tentang tim penyusun;
3. Notulen rapat;
4. Daftar hadir;
5. Matriks usulan masyarakat;
6. Peta wilayah kalurahan;
7. Daftar rencana kegiatan per tahun; dan
8. Dokumen pendukung lainnya (foto kegiatan)

Tabel IV.1
Perubahan Rencana Program/ Kegiatan Pembangunan Kalurahan Ngoro-oro Kapanewon Patuk
Tahun 2019 s.d 2026

No .	Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun								Kondisi Akhir RPJM Kalurah an	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Sasar an SDGs ke
					ke-1	ke-2	ke-3	ke-4	ke-5	ke-6	ke-7	ke-8		Jumlah Rp.	Sumber	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Tertib Administrasi	96 bulan	0									100%	12,673,564,721	APBKal	1, 3, 9, 10, 11, 17
1	Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa	Siltap, tunjangan, jaminan sosial dan operasional	96 bulan/ 9.548 OB	0	6%	11%	11%	11%	14%	15%	16%	16%	100%	6,416,180,155	APBKal	3, 9, 17
1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Siltap dan tunjangan	96 bulan/ 16 OB	0	10%	11%	12%	12%	13%	14%	14%	14%	100%	341,410,000	APBKal/ADD/ PAKal/DLL/ PBH	
2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Siltap dan tunjangan	96 bulan/ 2.080 OB	0	9%	11%	12%	12%	13%	14%	14%	14%	100%	4,541,024,100	APBKal/ADD/PA Kal/ DLL/PBH	
3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jaminan Sosial	96 bulan/ 4.032 OB	0	4%	17%	12%	12%	13%	14%	14%	14%	100%	313,911,703	APBKal/ ADD	3
4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/ atribut, listrik/telpon, dll)	Operasional	96 bulan/ 108 OB	0	11%	12%	14%	14%	12%	11%	13%	13%	100%	455,201,752	APBKal/ ADD	9
5	Penyediaan Tunjangan BPD	Tunjangan	96 bulan / 936 OB	0	10%	10%	11%	13%	13%	14%	14%	14%	100%	422,783,340	APBKal/ ADD/PAKal	17
6	Penyediaan Operasional BPD (ATK, uang sidang, makan-minum rapat, perlengkapan perkantoran, perjalanan dinas, listrik/telpon, dll)	Operasional	96 bulan	0	5%	16%	14%	14%	13%	12%	12%	12%	100%	52,370,000	APBKal/ ADD	17
7	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	Tunjangan dan jaminan sosial	96 bulan/ 2.376 OB	0	2%	12%	10%	10%	12%	18%	18%	18%	100%	177,104,260	APBKal/ADD/ PAKal /PBH	17

8	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	Operasional	96 bulan	0	0	0	0	0	22%	23%	27%	27%	100%	112,375,000	APBKal/ DDS	17
2	Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	Alat kerja memadai	42 Unit	0										531,439,349	APBKal	9, 11
1	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan	Aset tetap	16 Unit	0	2%	3%	12%	2%	3%	24%	27%	27%	100%	55,548,856	APBKal/ADD/ DLL	9
2	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Gedung kantor terpelihara	8 kali	0	9%	6%	6%	11%	12%	35%	11%	11%	100%	40,435,500	APBKal/DD/PBH /DLL/DDS	11
3	Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana Kantor Desa	Rehap kantor	8 kali	0	17%	25%	26%	20%	1%	6%	2%	2%	100%	314,804,993	APBKal/DLL/ PBH/PBP/DDS	11
4	Pengadaan peralatan kerja	Tersedianya alat kerja	14 Unit	0	0	68%	11%	5%	16%	0	0	0	100%	58,700,000	APBKal/DLL/ PAKal	9
5	Pengadaan mebeleur	Tersedianya meubeler kantor	11 Unit	0	0	0	35%	46%	19%	0	0	0	100%	8,500,000	APBKal/DLL/ PAKal	9
6	Penyediaan jasa perbaikan/servis mebeleur	Service mebeleur	2 kali	0	0	0	0	0	0	50%	50%	0	100%	2,400,000	APBKal/ PAKal	9
7	Rehabilitasi/pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Sepeda motor dinas siap pakai	96 bulan	0	12%	17%	15%	12%	12%	11%	10%	12%	100%	21,550,000	APBKal/ ADD/ PAKal /DLL /PBH	9
8	Penyediaan jasa perbaikan/servis peralatan kerja	Lapotop dan wireless siap pakai	96 bulan	0	9%	17%	13%	14%	13%	11%	12%	12%	100%	28,000,000	APBKal/ ADD/ PAKal /DLL /PBH	9
9	Pengadaan mesin/kartu absensi	Mesin absensi	1 Unit	0	0	0	100 %	0	0	0	0	0	100%	1,500,000	APBKal/ ADD	9
3	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	Angka kemiskinan		0										147,717,187	APBKal	1, 17
1	Penyusunan/Pendataan/Pem utakhiran Profil Desa	Data profil desa yang update	8 kali	0	2%	15%	9%	9%	23%	29%	8%	4%	100%	46,244,500	APBKal/ADD/ DDS/PAKal/PBH /PBP	1
2	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa	Tertatanya administrasi dan arsip	8 kali	0	10%	10%	15%	20%	15%	8%	17%	5%	100%	24,112,687	APBKal/ADD/ PBH/PAKal/PBP	17
3	Penyusunan monografi desa	Monografi desa	16 dokumen	0	8%	21%	18%	18%	8%	8%	6%	12%	100%	5,625,000	APBKal/ PAKal /DDS/DLL /PBP	17
4	Pendataan keluarga/rumah tangga miskin	Pendataan RTM	8 kali	0	7%	7%	3%	3%	12%	28%	29%	10%	100%	71,735,000	APBKal/ADD/ PAKal/DLL/PBH /PBP	1
4	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan			0										851,007,644	APBKal	9, 10, 17

1	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/ Pembahasan APBDesa (Musdes, Musrenbangdes/ Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler)	Muskal dan musrenbangkal	10 kali	0	23%	21%	18%	17%	0	0	0	21%	100%	54,325,000	APBKal/ ADD/ PAKal/ DLL/PBH	10
2	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa)	Musdus dan Muskal BLT	4 kali	0	33%	23%	22%	23%	0	0	0	0	100%	26,376,000	APBKal/DD/PBH	10
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa, dll)	RPJMKal dan RPKKal	10 dokumen	0	14%	10%	9%	9%	8%	9%	17%	24%	100%	37,282,059	APBKal/ADD/ PBH /PBP	10
4	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait)	Dokumen APBDES/ Perubahan APBDES dan LPJ APBDES	30 dokumen	0	10%	10%	12%	13%	14%	9%	8%	23%	100%	56,006,000	APBKal/ADD/ PBH/PAKal/DLL /PBP	10
5	Pengelolaan/Administrasi/Inv entarisasi/ Penilaian Aset Desa	Dokumen Aset Kalurahan	96 bulan/ 16 dokumen	0	4%	4%	4%	6%	6%	29%	18%	28%	100%	56,015,000	APBKal/ADD/ PBH/PAKal/DDS /DLL/PBP	10
6	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll - diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan)	Dokumen perdes diluar RPJMKal, RPKKal dan APBKal	96 bulan	0	17%	9%	6%	6%	10%	6%	32%	14%	100%	39,925,000	APBKal/ADD/ PBH /PAKal/PBP	10
7	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)	Dokumen LPPD, LKPPD, IPPD	24 dokumen	0	10%	10%	20%	18%	13%	11%	7%	12%	100%	9,782,000	APBKal/ADD/ PBH/DLL /PBP	17
8	Pengembangan Sistem Informasi Desa	Sistem informasi desa yang aktif	8 kali	0	3%	3%	24%	15%	13%	14%	14%	14%	100%	155,557,500	APBKal/ADD/ DDS/PAKal	9
9	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa)	Pemilihan BPD dan Lurah	2 kali	0	11%	0	0	0	0	45%	0	44%	100%	167,522,000	APBKal/ADD/ PBK	17
10	Penyusunan laporan keuangan bulanan/SPJ dan semesteran	LPJ bulanan /spj semesteran	112 dokumen	0	3%	9%	8%	6%	20%	19%	17%	18%	100%	31,178,980	APBKal/ADD/ DLL PAKal/ PBK	17
11	Pengisian perangkat desa	Perangkat desa baru	5 kali	0	18%		21%	0	0	19%	21%	21%	100%	95,473,700	APBKal/ ADD/ PBH	17

12	Penghargaan purna tugas bagi aparaturn pemerintahan desa	Penghargaan pamong dan lurah	6 perangkat desa	0	7%	19%	0	0	0	20%	26%	28%	100%	95,070,000	APBKal/ADD/PBH/PAKal	17
13	Pengadaan pakaian dinas/seragam	Pakaian dinas pamong	3 kali	0	0	22%	0	0	52%	0	0	27%	100%	14,455,000	APBKal/ PAKal/ PBH	10
14	Monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan	Monev pembangunan	10 kali	0	0	0	0	18%	16%	17%	25%	25%	100%	12,039,405	APBKal/ DLL/ PBH/PBK	10
15	Pertanahan			0										4,727,220,386	APBKal	10, 11
16	Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin	Serfitikat tanah	740 bidang	0	0	0	0	0	0	0	50%	50%	100%	222,300,000	APBKal/ PAKal	10
17	Pelepasan dan Pengadaan pengganti tanah desa	Tanah pengganti	4 bidang	0	0	49%	50%	0.10 %	0.10 %	0.10 %	0.10 %	0.10 %	100%	4,496,445,386	APBKal/ PAKal/ DLL	11
18	Intensifikasi pemungutan pajak daerah /PBB	Pajak PBB	2 kali	0	45%	55%	0	0	0	0	0	0	100%	8,475,000	APBKal/ ADD/ PAKal	10
II	Pelaksanaan Pembangunan Desa		1500 M2	0	50	50	50	50	50	50	50	50		5,128,262,475	APBKal	2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 17
1	Pendidikan			0									100%	322,187,500	APBKal/ DDS	4
1	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Ma drasah Non Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)	Honor Guru PAUD dan ustadz TPA	96 Bulan	0	13%	12%	7%	10%	10%	10%	19%	19%	100%	245,300,000	APBKal/ DDS	4
2	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD,dst)	Sarana Pembelajaran PAUD	6 Kali	0	0	0	5%	5%	14%	19%	29%	29%	100%	45,027,500	APBKal/ DDS	4
3	Pembangunan/Rehabilitasi/Pe ningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa	Sarana Perpustakaan	1 kali	0	0	100 %	0	0	0	0	0	0	100%	2,130,000	APBKal/ DDS	4
4	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Desa)	Oprasional, buku dan honor pengelola	84 bulan	0	8%	17%	0	12%	13%	14%	18%	18%	100%	29,730,000	APBKal/ DDS	4
2	Kesehatan			0									100%	1,237,792,323	APBKal	3

1	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)	Honor kader dan PMT	96 bulan	0	4%	12%	14%	2%	14%	16%	19%	19%	100%	617,221,400	APBKal/ DDS	3
2	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)	Pelatihan kader kesehatan	6 kali	0	0	0	10%	11%	11%	20%	24%	24%	100%	34,920,000	APBKal/ DDS	3
3	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Rembuk Stunting dan MMD	12 kali	0	1%	1%	0	5%	6%	10%	54%	21%	100%	175,735,263	APBKal/ DLL/DDS	3
4	Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	Service alat posyandu	3 kali	0	0	0	0	0	0	0%	50%	50%	100%	14,400,000	APBKal/ DDS	3
5	Pembangunan/Rehabilitasi/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	Pengadaan sarana Posyandu	6 kali	0	0	25%	0	26%	20%	7%	11%	11%	100%	37,355,000	APBKal/ DDS	3
6	Penyelenggaraan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu)	Operasional dan honor kader	84 bulan	0	14%	18%	0	14%	14%	14%	13%	13%	100%	204,190,000	APBKal/ DDS	3
7	Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	Penyuluhan dan kegiatan olah raga	60 bulan	0	0	0	0	22%	16%	20%	21%	21%	100%	32,065,000	APBKal/ DDS	3
8	Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	PMT TK dan PAUD	200 anak /tahun	0	0	0	0	9%	13%	26%	26%	26%	100%	35,795,000	APBKal/ DDS	3
9	Pembinaan dan pengembangan Kampung KB	Pembinaan kampung KB	1 kali	0	0	0	0	0	0	100 %	0	0	100%	3,100,000	APBKal/ DDS	3
10	Insentif kader kesehatan/KB	Insentif kader kesehatan/kb	84 bulan	0	15%	18%	0	21%	21%	8%	8%	8%	100%	83,010,660	APBKal/ DDS	3
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			0									100%	2,525,342,312	APBKal	2, 9, 11, 13
1	Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa	Pengecatan Gapura batas desa	4 kali	0	0	0	0	0	26%	24%	25%	25%	100%	6,064,000	APBKal/ DDS	11
2	Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Desa	Jalan Kalurahan	1500 M2	0	0	0	21%	0	17%	29%	14%	19%	100%	567,283,177	APBKal/ DDS	9
3	Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	Jalan lingkungan pemukiman	390 M2	0	0	0	0	0	100 %	0	0	0	100%	185,850,000	APBKal/PBK/ DDS	11
4	Pembangunan/Rehabilitasi/Pengerasan Jalan Usaha Tani	Jalan usaha tani	3 titik	0	0	0%	0	0	48%	0	0	52%	100%	165,000,000	APBKal/PBK/ DDS	2
5	Pembangunan/Rehabilitasi Jembatan Milik Desa	Jembatan penhubung padukuhan	1 unit	0	100 %	0	0	0	0	0	0	0	100%	14,382,500	APBKal/ DDS	9

6	Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana Jalan Desa (gorong-gorong, selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)	Talud dan drainase	12 titik	0	40%	14%	22%	1%	9%	0	6%	7%	100%	1,483,312,635	APBKal/DDS/PBK	11, 13
7	Pembangunan/Rehabilitasi Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	Balai padukuhan	4 unit	0	0	0	0	58%	42%	0	0	0	100%	95,000,000	APBKal/PBK/PBP	9
8	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa	Peta desa	1 dokumen	0	0	0	0	100%	0	0	0	0	100%	3,950,000	APBKal/ DDS	17
9	Pembangunan/Rehabilitasi Embung Desa	Embung	1 titik	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%	-	APBKal/ DDS	2
10	Penyediaan sarana prasarana pemakaman milik desa	Tempat pemandian jenazah	1 titik	0	0	0	0	100%	0	0	0	0	100%	4,500,000	APBKal/ DDS	11
4	Kawasan Permukiman			0									100%	765,908,840	APBKal	3, 6, 7
1	Pembangunan/Rehabilitasi Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)	Sumber air dan tendon air	3 titik	0	0	0%	71%	0	29%	0	0	0	100%	50,551,000	APBKal/ DDS	6
2	Pembangunan/Rehabilitasi Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll)	Pipanisasi	4 titik	0	30%	26%	0	0	0	13%	0	30%	100%	132,830,000	APBKal/ ADD/DDS	6
3	Pembangunan/Rehabilitasi Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)	Rehab Bank Sampah	1 unit	0	0	0	0	0	0	100%	0	0	100%	12,997,840	APBKal/ PBK	7
4	Pembangunan/Rehabilitasi Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)	SPAL rumah tangga	50 titik	0	0	0	0	0	12%	21%	33%	33%	100%	153,050,000	APBKal/ DDS	6
5	Pemberian stimulan jamban sehat	Jamban sehat	80 titik	0	8%	11%	11%	12%	15%	15%	14%	14%	100%	392,013,000	APBKal/ DDS	3
6	Pengelolaan sampah desa/permukiman	Pengelolaan bank sampah	2 kali	0	0	0	0	52%	0	0	48%	0	100%	19,492,000	APBKal/ DDS	3
7	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah	Pembinaan pengelolaan sampah	1 kali pelatihan	0	100%	0	0	0	0	0	0	0	100%	4,975,000	APBKal/ DDS	3
5	Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika			0									100%	89,771,500	APBKal	10, 17

1	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Pembuatan Poster/ Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll)	APBKal dan LPJ	30 baliho	0	9%	16%	15%	8%	31%	7%	7%	7%	100%	30,596,500	APBKal/DLL/ DDS /PBH	10
2	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	Internet kalurahan	72 bulan	0	30%	0	0	12%	23%	11%	11%	11%	100%	59,175,000	APBKal/ DDS	17
6	Pariwisata			0									100%	187,260,000	APBKal	8, 9
1	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	Pemeliharaan obyek wisata	1 titik	0	0	100 %	0	0	0	0	0	0	100%	130,000,000	APBKal/ DDS	9
2	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	Alat pendukung wisata	4 kali	0	0	0	0		31%	37%	16%	16%	100%	30,760,000	APBKal/ DDS	8
3	Pembinaan dan Pengembangan Desa Wisata	Pembinaan Desa Wisata	5 kali	0	0	0	0	23%	26%	17%	17%	17%	100%	26,500,000	APBKal/ DDS	8
III	Pembinaan Kemasyarakatan Desa			0										549,493,573	APBKal	1, 3, 11, 13, 16, 17, 18
1	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat			0									100%	208,539,904	APBKal	11, 13, 16, 17
1	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dll)	Poskamling	1 Unit	0	100 %	0	0	0	0	0	0	0	100%	32,671,100	APBKal/ PBH	11
2	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/ Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)	Pembinaan Linmas	8 Kali	0	18%	27%	14%	14%	2%	9%	8%	8%	100%	44,711,800	APBKal/DLL/ PBH	17
3	Pelatihan Kesiapsiagaan/ Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	Pelatihan Kaltana	1 kali	0	0	0	0	100 %	0	0	0	0	100%	3,200,000	APBKal/ PBH	13
4	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat	Desa sadar hukum	1 kali	0	0	0	0	100 %	0	0	0	0	100%	2,775,000	APBKal/ DLL	16
5	Pembinaan kelembagaan Desa Tangguh Bencana	Oprerasional Kaltana	84 bulan	0	0	10%	15%	26%	16%	16%	9%	9%	100%	27,685,728	APBKal/PBH/ DLL	13

6	Pengadaan sarana prasarana pendukung kesiapsiagaan bencana	Peralatan/ perlengkapan KSB	10 Unit	0	0	0	0	0	100 %	0	0	0	100%	3,555,000	APBKal/ PBH	13
7	Pembinaan Jaga Warga	Jaga Warga	4 kali	0	0	10%	85%	0	0	0	5%	0%	100%	93,941,276	APBKal/PBH/ PBP /DLL	17
2	Kebudayaan dan Keagamaan			0									100%	113,195,600	APBKal	18
1	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	Honor peletih seni budaya	48 bulan	0	10%	8%	0	0	12%	0	0	70%	100%	41,236,000	APBKal/DLL/ PBP	18
2	Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota	Lomba karawitan	2 kali	0	0	42%	0	0	58%	0	0	0	100%	5,825,000	APBKal/ PAKal/ DLL/PBH	18
3	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa	HUT Kemerrdekaan RI dan Hari Jadi Gunungkidul	5 kali	0	26%	16%	18%	16%	24%	0	0	0	100%	39,132,100	APBKal/ PAKal/ DLL/PBH	18
4	Pemberian stimulan kegiatan keagamaan	Honor guru TPA	14 orang	0	36%	35%	29%	0	0				100%	27,002,500	APBKal/ DLL	18
3	Kepemudaan dan Olah Raga			0									100%	67,961,250	APBKal	17, 18
1	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten	Pekan olah raga antar desa/ kalurahan	3 kali	0	22%	48%	0	0	30%	0	0	0	100%	13,550,000	APBKal/ PBH	18
2	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa	Pekan olah raga antar padukuhan	3 kali	0	43%	31%	0	0	26%	0	0	0	100%	22,250,000	APBKal/ PBH	18
3	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa	Lapangan sepak bola	5 kali	0	14%	16%	16%	22%	32%	0	0	0	100%	7,354,000	APBKal/DLL/ PBH	17
4	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/ Klub Olah raga	Pembinaan Karang taruna	4 kali	0	12%	31%	28%	29%	0	0	0	0	100%	10,465,150	APBKal/ PAKal/ DLL/PBH	17
5	Operasional Karang Taruna	Tertib Administrasi	96 bulan	0	10%	11%	14%	14%	12%	11%	11%	18%	100%	14,342,100	APBKal/DLL/ PBH /ADD	17
4	Kelembagaan Masyarakat			0									100%	159,796,819	APBKal	1, 3, 17
1	Pembinaan LPMP dan/atau LPMD	Pembinaan LPMD	3kali	0	12%	9%	79%	0	0	0	0	0	100%	24,241,670	APBKal/ DLL	17
2	Pembinaan PKK	Pembinaan PKK	2 kali	0	45%	55%	0	0	0	0	0	0	100%	3,917,500	APBKal/ DLL	17

3	Pembentukan lembaga kemasyarakatan desa	Pembentukan LKD	1 kali	0	100 %	0	0	0	0	0	0	0	100%	8,800,000	APBKal/ PBH	17
4	Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	Honor KPM	144 OB	0	0	0	12%	9%	9%	35%	17%	17%	100%	42,180,000	APBKal/ DDS	3
5	Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKPK Desa)	TKPK Desa	60 bulan	0	17%	20%	16%	22%	25%	0	0	0	100%	27,687,067	APBKal/ PAKal/ DLL/ ADD/PBH	1
6	Pembinaan RT/RW	Pembinaan RT/RW	1 kali	0	100 %	0	0	0	0	0	0	0	100%	10,200,000	APBKal/ DLL	17
7	Operasional LPMD dan/atau LPMD	Tertib Administrasi	96 bulan	0	9%	11%	12%	18%	9%	8%	17%	17%	100%	15,542,032	APBKal/DLL/ PBH /ADD	17
8	Operasional PKK	Tertib Administrasi	96 bulan	0	6%	17%	18%	15%	12%	10%	10%	11%	100%	27,228,550	APBKal/DLL/ PBH /ADD	17
IV	Pemberdayaan Masyarakat Desa			0										1,781,259,132	APBKal	2, 3, 4, 8, 12, 17
1	Kelautan dan Perikanan			0									100%	151,052,000	APBKal	4, 12
1	Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa	Kolam ikan darat	1 titik	0	0	100 %	0	0	0	0	0	0	100%	11,000,000	APBKal/ DDS	12
2	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)	Kolam dan bibit ikan	30 titik	0	0	0	0	22%	19%	20%	20%	20%	100%	125,662,000	APBKal/ DDS	12
3	Pembinaan kelompok perikanan darat	Peternak lele	3 kelompok	0	0	0	0	0	34%	33%	33%	0	100%	10,290,000	APBKal/ DDS	4
4	Pelatihan dan Pengembangan pakan ikan alternatif	Pembuatan pakan ikan	1 kali	0	0	0	0	0	0	100 %	0	0	100%	4,100,000	APBKal/ DDS	4
2	Pertanian dan Peternakan			0									100%	762,454,296	APBKal	2, 4, 17
1	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll)	Pengolahan hasil pertanian	1 kali	0	100 %		0	0	0	0	0	0	100%	4,950,000	APBKal/ DDS	2
2	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll)	Bantuan bibit tanaman	5 kali	0	0		0	21%	18%	24%	27%	11%	100%	699,948,400	APBKal/ DDS	2
3	Pelatihan pengolahan hasil pertanian/peternakan	Pelatihan UMKM	5 kali	0	0	35%	0	30%	10%		13%	13%	100%	32,726,350	APBKal/ DDS	4
4	Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/ Gapoktan	Pembinaan Gapoktan	7 kali	0	18%	18%	0	14%	12%	12%	12%	12%	100%	24,829,546	APBKal/ DDS	17

3	Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa			0									100%	7,825,000	APBKal	17
1	Peningkatan kapasitas kepala Desa	Pelatihan Lurah	1 kali	0	0	0	0	0	0	0	100 %		100%	875,000	APBKal/ DDS/PBP	17
2	Peningkatan kapasitas perangkat Desa	Pelatihan Pamong dan staf	2 kali	0	0	0	0	0	0	0	42%	58%	100%	5,000,000	APBKal/ DDS/PBP	17
3	Peningkatan kapasitas BPD	Pelatihan BPD	1 kali	0	0	0	0	0	0	0	0	100 %	100%	1,950,000	APBKal/ PBP	17
4	Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga			0									100%	31,399,050	APBKal	3
1	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)	Pelatihan Siswa/Guru SLB	4 kali	0	21%	21%	0	26%	0	0	0	32%	100%	27,974,050	APBKal/PBH/ DDS	3
2	Penyuluhan/pembinaan kesehatan reproduksi pada remaja	Pembinaan remaja	1 kali	0	0	0	0	0	0	100 %	0	0	100%	3,425,000	APBKal/ DDS	3
5	Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)			0									100%	38,000,000	APBKal	8
1	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM	Pelatihan pengelolaan koperasi	2 kali	0	0	0	0	0	0	0	50%	50%	100%	8,000,000	APBKal/ DDS	8
2	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi	Prasarana kantor koperasi	10 unit	0	0	0	0	0	0	0	50%	50%	100%	14,000,000	APBKal/ DDS	8
3	Pengiriman kelompok dalam promosi/pameran produk usaha masyarakat di tingkat Kecamatan/Daerah/Nasional	Pameran UMKM	4 kali	0	0	0	0	0	23%	20%	38%	20%	100%	16,000,000	APBKal/ DDS	8
6	Dukungan Penanaman Modal			0									50%	29,612,000	APBKal	8
1	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa	Pengelola BUMKal	7 kali	0	0	21%	11%	14%	7%	7%	20%	20%	100%	29,612,000	APBKal/DDS/ PBH	8
2	Pembangunan Gedung Kantor BUM Desa		1 Unit	0	0	0	0	0	0	0	100 %	0	0%		APBKal/DDS	8
7	Perdagangan dan Perindustrian			0									100%	760,916,786	APBKal	8
1	Pembangunan/Rehabilitasi Pasar Desa/Kios milik Desa	Pasar Desa	7 kali	0	0	12%	12%	18%	14%	9%	29%	7%	100%	740,036,786	APBKal/ PAKal/ DDS	8
2	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan /Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll)	Pelatihan industri rumah tangga	4 kali	0	0	0	0	29%	0	24%	24%	24%	100%	16,880,000	APBKal/ DDS	8

3	Pembinaan/pelatihan pengelolaan pasar desa	Pengelola pasar	2 kali	0	0	0	0	50%	50%	0	0	0	100%	4,000,000	APBKal/ DDS	8
V	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa			0										1,716,703,853	APBKal	1, 13
1	Penanggulangan Bencana			0										555,409,803	APBKal	13
1	Penanggulangan Bencana	Sarana/prasarana wilayah	8 titik	0	1%	6%	62%	12%	3%	6%	3%	7%	100%	555,409,803	APBKal/DLL/ DDS	13
2	Keadaan Darurat													3,594,050	APBKal	13
1	Keadaan Darurat	Penyelamatan jiwa	12 bulan	0	100 %	0	0	0	0	0	0	0	100%	3,594,050	APBKal/ PBH	13
3	Keadaan Mendesak.			0										1,157,700,000	APBKal	1
1	Keadaan Mendesak	Kemiskinan Ekstrim	96 bulan	0	0.26 %	29%	21%	29%	8%	5%	3%	5%	100.00 %	1,157,700,000	APBKal/PBH/ DDS	1
VI	PENGELUARAN PEMBIAYAAN			0									100%	503,433,000	APBKal	8, 17, 2
1	Penyertaan Modal BUMDesa	Manfaat Usaha	2 tahun	0	42%	58%	0	0	0	0	0	0	100%	119,000,000	APBKal/ DDS	8
2	Penyertaan Modal BUMKALMA	Kelayakan Usaha	2 tahun	0	0	0	0	0	50%	0	50%	0	100%	100,000,000	APBKal/ DDS	17
3	Penyertaan Modal BUMDesa Ketahanan Pangan	Kelayakan Usaha	1 tahun	0	0	0	0	0	0	0	100 %	0	100%	374,433,000	APBKal/ DDS	2

PETA WILAYAH KALURAHAN NGORO-ORO

